

**POLITIK KEKUASAAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN REVISI UNDANG-UNDANG
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI DETIK.COM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)**

Oleh:

M. SHANDIKA AL KAFI

1617102071

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Shandika Al Kafi
NIM : 1617102071
Jenjang : S1
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Program Studi : Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **Politik Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media Online Analisis Framing Pemberitaan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Detik.com** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam bentuk daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 5 Agustus 2020

Yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



M. Shandika Al Kafi
NIM. 1617102071

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

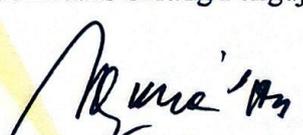
**POLITIK KEKUASAAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN REVISI UU KPK DI DETIK.COM**

yang disusun oleh Saudara: **M. Shandika Al Kafi**, NIM. 1617102071, Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam** Jurusan **Penyiaran Islam**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **22 Juli 2020**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

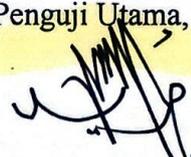
Ketua Sidang/Pembimbing,


Ahmad Muttaqin, S.Ag, M.Si.
NIP 19791115 200801 1 018

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Nurma Ali Ridlwan, M.Ag.
NIP 19740109 200501 1 003

Penguji Utama,


Muridan, M.Ag.
NIP 19740718 200501 1 006

Mengesahkan,



Tanggal 5-8-2020

Dekan,


Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

IAIN Purwokerto

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Shandika Al Kafi
NIM : 1617102071
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Program Studi : Penyiaran Islam
Judul Skripsi : **Politik Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media Online Analisis Framing Pemberitaan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Detik.com**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Komunikasi Penyiaran Islam (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 5 Agustus 2020

Pembimbing



Ahmad Muttaqin, M.Si.
NIP. 19791115 200801 1 018

**POLITIK KEKUASAAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN REVISI UNDANG-UNDANG
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI DETIK.COM**

M. SHANDIKA AL KAFI
NIM. 1617102071

ABSTRAK

Revisi UU KPK merupakan isu sensitif yang banyak mendapat perhatian masyarakat. Pro kontra terjadi antara masyarakat yang mendukung dan menolak. Bagi yang mendukung revisi UU KPK dinilai sebagai cara untuk memperkuat KPK, sebaliknya yang menolak menilai revisi UU KPK sebagai pelemahan terhadap sistematis lembaga KPK. Media detik.com adalah media *online* yang aktif memberitakan isu revisi UU KPK tersebut mulai dari diusulkannya oleh DPR pada rapat paripurna yang hanya dihadiri 70 anggota Dewan hingga disahkannya menjadi UU KPK yang baru. Media detik.com memiliki versi pemberitaan yang berbeda dengan media lain. perbedaan tersebut disebabkan oleh struktur dasar media meliputi *interest* politik, ideologi dan kepentingan lain. struktur dasar tersebut kemudian secara teknis dipermula dalam bentuk pemberitaan. Dengan demikian, berita-berita detik.com tidak “sebagaimana mestinya” tetapi dikerangkakan oleh struktur dasar. Untuk melihat itu, peneliti menganalisa dengan pendekatan *framing* berita.

Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap berita-berita di media detik.com mengenai revisi UU KPK pada periode 4 September sampai 17 September 2019 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis *framing* model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki yang memuat empat dimensi struktural, yaitu: *sintaksis, skrip, tematik, dan retorik*.

Hasil penelitian menunjukkan pembingkaihan yang dilakukan media detik.com terhadap pemberitaan revisi UU KPK adalah bahwa revisi UU KPK suatu tindakan pelanggaran. Hal ini ditonjolkan dari setiap pemberitaan yang muncul dalam penekanan kutipan yang menyatakan revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah adalah sebagai upaya sistematis, serampangan dan banyak hal ganjil seperti yang terdapat pada struktur *sintaksis* dan *retoris*.

Kata kunci: analisis *framing*, revisi UU KPK, media *online*

MOTTO

“Nosce te ipsum!”

“Kenalilah dirimu sendiri!”

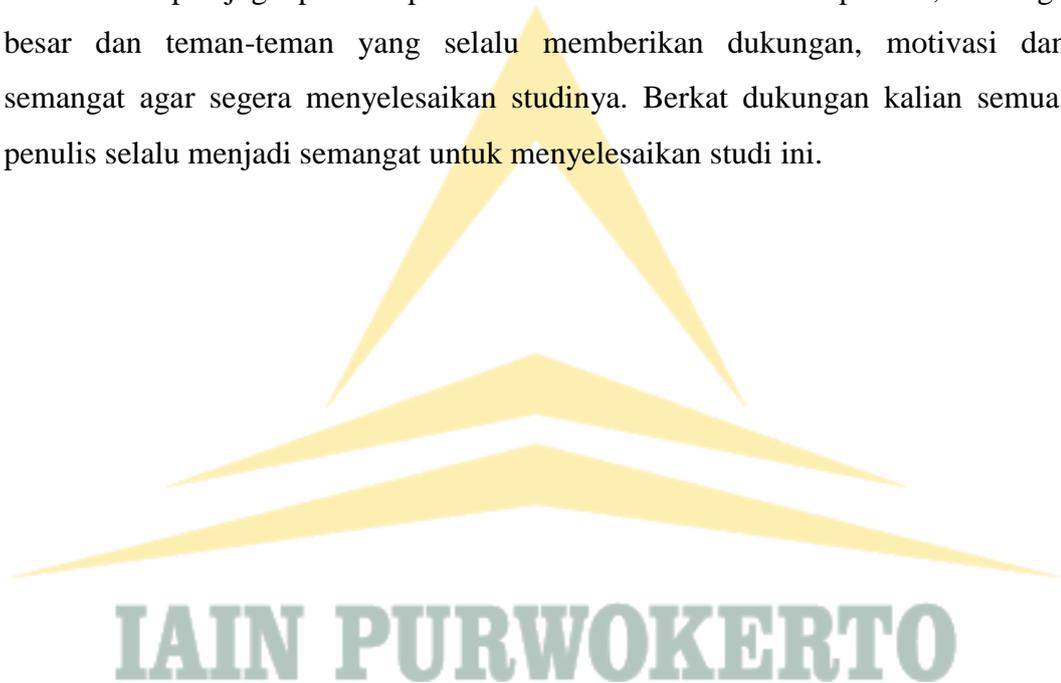


HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberi petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkah kebaikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati yang tulus karya ini penulis persembahkan untuk:

Bapak Imron dan Ibu Suci, yang penuh keikhlasan dan kasih sayangnya selalu memberikan perhatian, bimbingan, motivasi, dan senantiasa mendoakan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa selalu diberikan kesahatan dan perlindungan-Nya. Aamiin.

Skripsi juga penulis persembahkan untuk adik-adik penulis, keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat agar segera menyelesaikan studinya. Berkat dukungan kalian semua, penulis selalu menjadi semangat untuk menyelesaikan studi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan sepanjang zaman, beserta para sahabat dan pengikutnya, yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang dihiasi dengan ilmu seperti saat ini.

Berkenaan dengan selesainya skripsi yang berjudul “Politik Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media Online Analisis Framing Pemberitaan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Detik.com” yang tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, nasehat, dan motivasi kepada penulis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Prof. Dr. KH. Abdul Basit, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto.
3. Uus Uswatusolihah, S.Ag., M.A. dan Warto, M.Kom. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Purwokerto.
4. Ahmad Muttaqin, M.Si. selaku Penasehat Akademik sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga besar Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Purwokerto.
6. Keluarga besar, terutama orang tua saya Bapak M. Imron dan Ibu Suci Jolekha, banyak terima kasih yang telah memberi dukungan moral maupun materiil untuk menyelesaikan skripsi.
7. Adik-adik saya, M. Akmal Alvino, M. Tafarel Al Faruq, dan Athaya Rachel Jelita yang selalu memberikan semangat.
8. Teman hidup yang tak bosan-bosannya memotivasi, memberi semangat dan dukungan yang menjadikan menjadi semangat menulis.
9. Teman-teman KPI Angkatan 2016 yang sudah memberi warna, keceriaan dan inspirasi.

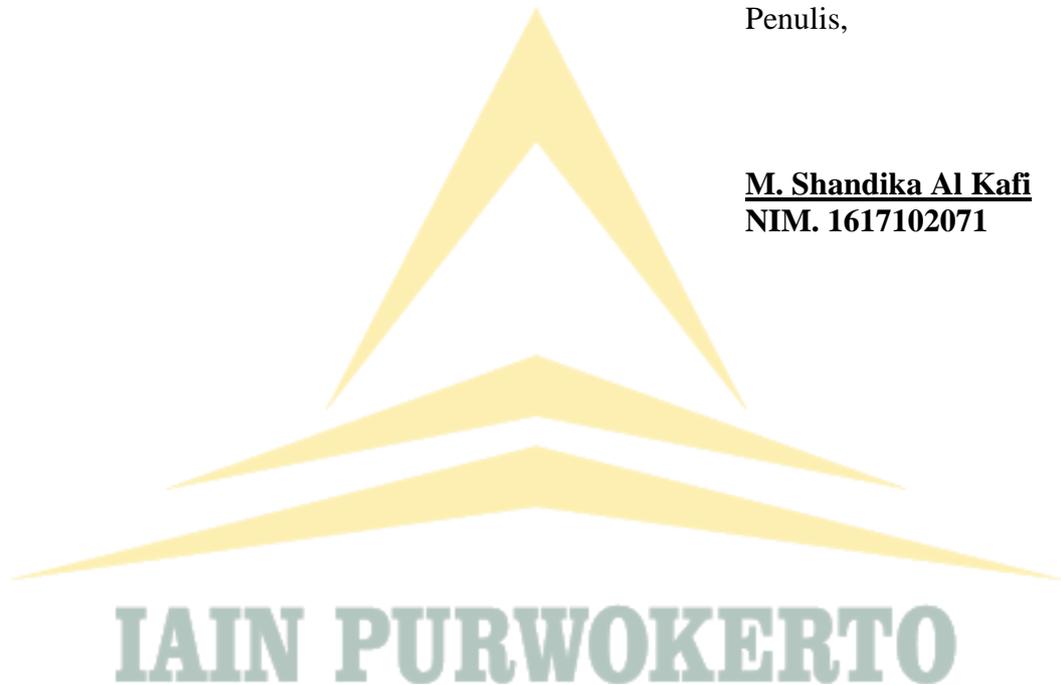
10. Teman-teman Komunitas Fotografi FIXLENS yang sudah menjadi keluarga dan tempat berproses khususnya di bidang fotografi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu.

Tak ada kata yang dapat penulis ucapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih dari Allah SWT. Aamiin.

Purwokerto, 1 Juli 2020

Penulis,

M. Shandika Al Kafi
NIM. 1617102071

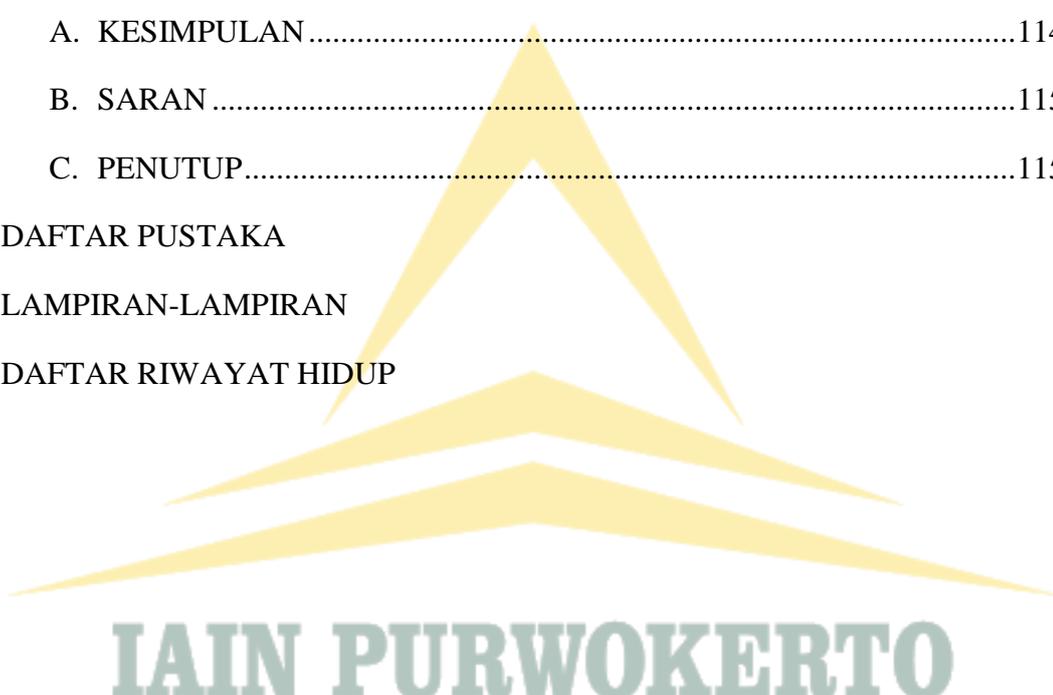


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. DEFINISI OPERASIONAL	4
C. RUMUSAN MASALAH.....	7
D. TUJUAN PENELITIAN.....	7
E. MANFAAT PENELITIAN.....	7
F. TINJAUAN PUSTAKA	8
G. METODE PENELITIAN.....	10
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	13
BAB II POLITIK MEDIA DALAM INDUSTRI PERS.....	15
A. MEDIA DAN KEBEBASAN PERS	15
1. Pengertian Media.....	15
2. Pengertian Pers.....	16

3. Kebebasan Pers	17
B. IDEOLOGI MEDIA.....	19
C. INDUSTRIALISASI MEDIA.....	22
D. POLITIK BERITA.....	24
E. FRAMING BERITA.....	27
F. TEKNIK FRAMING BERITA	30
BAB III DETIK.COM DAN POLITIK MEDIA.....	37
A. PROFIL MEDIA DETIK.COM.....	37
1. Gambaran Umum Detik.com	37
2. Sejarah Detik.com	37
3. Jumlah Pengunjung Detik.com	38
4. Visi dan Misi Detik.com	39
5. Situs Berita Detik.com	39
B. STRUKTUR KEPEMILIKAN DETIK.COM	40
1. Kepemilikan Detik.com	40
2. Struktur Manejemen Detik.com.....	41
3. Struktur Redaksi Detik.com.....	41
C. IDEOLOGI MEDIA DETIK.COM	45
D. PENGELOLAAN MEDIA DETIK.COM	47
E. AFILIASI POLITIK MEDIA DETIK.COM	52
F. KETERLIBATAN POLITIK MEDIA DETIK.COM.....	54
BAB IV DETIK.COM DALAM KONSTELASI POLITIK DAN IDEOLOGI	
MEDIA	57
A. IDEOLOGI DETIK.COM	57
1. Afiliasi Politik Detik.Com	57
2. Afiliasi Politik Pemilik Media	58

3. Nilai-Nilai Dasar Detik.Com	59
B. DETIK.COM DALAM INDUSTRI MEDIA	60
1. Orientasi Industri Media	60
2. Progres Lembaga Detik.com.....	61
3. Komposisi Pemilik Modal	62
C. REVISI UU KPK DALAM PERSPEKTIF MEDIA DETIK.COM	63
D. ANALISIS FRAMING BERITA REVISI UU KPK.....	65
BAB V PENUTUP.....	114
A. KESIMPULAN.....	114
B. SARAN.....	115
C. PENUTUP.....	115
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Revisi UU KPK di Situs detik.com



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo media detik.com

Gambar 2 Berita 1

Gambar 3 Berita 2

Gambar 4 Berita 3

Gambar 5 Berita 4

Gambar 6 Berita 5

Gambar 7 Berita 6

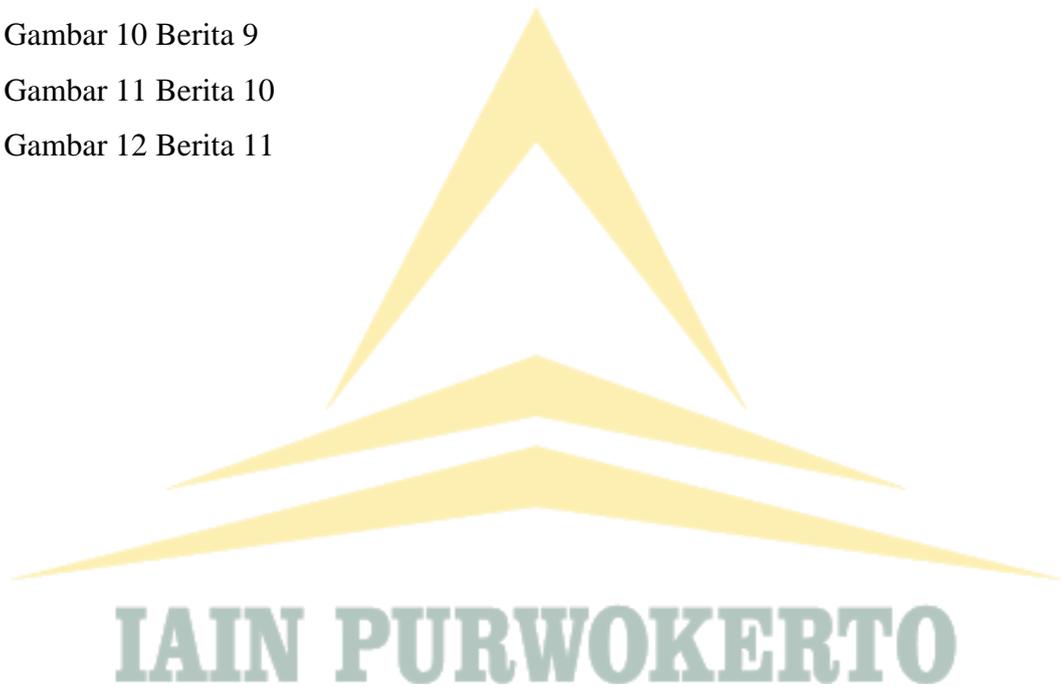
Gambar 8 Berita 7

Gambar 9 Berita 8

Gambar 10 Berita 9

Gambar 11 Berita 10

Gambar 12 Berita 11



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Definisi Framing Menurut Para Ahli
- Tabel 2 Kerangka Framing Pan Dan Kosicki
- Tabel 3 Daftar Berita Periode 4 – 17 September 2019
- Tabel 4 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 1
- Tabel 5 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 2
- Tabel 6 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 3
- Tabel 7 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 4
- Tabel 8 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 5
- Tabel 9 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 6
- Tabel 10 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 7
- Tabel 11 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 8
- Tabel 12 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 9
- Tabel 13 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 10
- Tabel 14 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 11



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut Effendy, salah satu fungsi dari media yaitu memberikan informasi, artinya bahwa media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Khalayak membutuhkan berbagai informasi sesuai dengan kepentingannya. Khalayak yang disebut sebagai makhluk sosial selalu merasa haus akan informasi apapun yang terdapat di dunia ini. Khalayak berlangganan surat kabar, majalah, mendengarkan radio atau menonton televisi hanya karena mereka ingin mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di muka bumi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan, diucapkan atau pun dilihat orang lain.¹

Di era sekarang yang semuanya serba digital ini, media massa kini bukan hanya dari media cetak dan media elektronik saja, namun muncul media yang paling baru yaitu internet atau media *online*. Dengan hadirnya media *online*, khalayak dapat mengakses informasi lebih cepat, mudah, dan praktis untuk dibaca kapanpun dan dimanapun karena media tersebut memiliki konsep yang cukup luas dan perkembangannya pun cukup pesat. Selain itu, komunikasi yang dijalin melalui media *online* tidak terbatas ruang dan waktu selama tersambung dengan koneksi internet.

Media massa dalam mengkonstruksi dan mendekonstruksikan realitas terutama pada pemberitaan biasanya memberikan prioritas liputan mengenai peristiwa ataupun isu tertentu dan mengabaikan yang lain (*agenda setting*). Di samping itu, media juga memberikan penekanan pada substansi persoalan tertentu berkenaan dengan peristiwa dan isu tertentu dan juga mengabaikan substansi persoalan lain (*framing*). Dengan kedua cara ini media massa mengkonstruksi dan mendekonstruksi sebuah realitas.²

Framing menurut Entman diartikan secara umum sebagai “*a scattered conceptualization*”, yaitu suatu bingkai konseptualisasi dimana

¹ Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2007), hlm. 18.

² Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2015), hlm. 104.

frame media dapat dimaknai sebagai pokok pengorganisasian pikiran atau penulisan berita yang memberikan makna mengenai peristiwa-peristiwa. *Frame* media menggambarkan hal yang seperti apa kontroversi yang berkembang dan esensi dari isu tersebut.³

Media massa juga bisa disebut sebagai saluran komunikasi politik yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik dengan kekuatan memengaruhi khalayak didukung oleh jangkauan yang luas, serentak dan cepat, sehingga media menjadikannya cara yang efektif membentuk opini publik oleh komunikator politik. Menurut Walter Lippmann, dalam bukunya yang berjudul *Public Opinion*, mengatakan bahwa media memiliki peran mendefinisikan dunia. Dimana media memegang peranan sebagai mediator yang akan mempertemukan realitas dengan gambaran yang ada dalam pikiran.⁴

Media massa bukan hanya sebagai sarana untuk menyampaikan peristiwa politik saja, melainkan juga dapat sebagai kekuatan penyebaran ideologi yang mendominasinya. Jadi, masyarakat dapat melihat representasi media massa dari ideologi tersebut. Dengan adanya kekuatan besar dalam pembentukan opini, media massa sering dijadikan sebagai kekuatan tujuan-tujuan politik, seperti lembaga-lembaga politik, LSM, dan sebagainya yang mempunyai kepentingan politik.

Latar belakang seorang wartawan dari media yang bersangkutan dapat menjadi pengaruh terhadap penyampaian suatu berita di berbagai media. Bagi masyarakat biasa, pesan dari suatu berita akan dinilai apa adanya. Tetapi, bagi kalangan tertentu yang paham betul gerak pers akan menilai berbeda terhadap berita tersebut. Mereka menilai bahwa setiap berita menyimpan ideologi dan campur tangan dari wartawan. Seorang wartawan pasti akan menuangkan ide mereka dalam analisisnya terhadap data yang diperolehnya di lapangan. Setiap media akan memberitakan sesuai dengan

³ Ibid, hlm. 104.

⁴ Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan aplikasi pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 159.

sudut pandang wartawan yang mengikuti alur dari kegiatan narasumber tersebut.⁵

Pada tanggal 5 September 2019, DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas pengesahan Revisi UU KPK menjadi RUU yang dihadiri oleh sekitar 70 orang anggota. Anggota DPR yang hadir pada sidang menyetujui akan hal tersebut. Berselang 5 hari, Presiden Jokowi menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari draf revisi UU KPK mengaku mengundang sejumlah pakar untuk mengkaji draf berisikan revisi UU KPK. Mensesneg Pratikno menyatakan bahwa Jokowi telah mengirim surat presiden ke DPR yang mengutus menteri untuk membahas Revisi UU KPK.⁶

Setelah surpres diterima DPR langsung menggelar rapat kerja bersama pemerintah mengebut pembahasan Revisi UU KPK yang berlangsung secara tertutup. Jokowi menggelar pers untuk menyatakan soal Revisi UU KPK. Jokowi menyetujui beberapa poin, yaitu penyadapan harus seizin dewan pengawas, kewenangan SP3 setelah 2 tahun, hingga pegawai KPK menjadi ASN. Selain menyetujui beberapa poin, Jokowi menolak 4 poin revisi UU KPK, diantaranya penyadapan dengan izin eksternal, penyidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja, penuntutan wajib berkoordinasi dengan Kejagung, dan LHKPN dikeluarkan dari KPK.⁷

Tiga pimpinan KPK pun juga menggelar jumpa pers di jam yang berbeda dan meyerahkan tanggung jawab ke Presiden. Mereka berharap diajak bicara Jokowi soal Revisi UU KPK. Jokowi merespon aksi tiga pimpinan KPK yang mengembalikan mandat tugas dan tanggung jawab pengelolaan KPK. Jokowi dengan tegas menjelaskan istilah ‘pengembalian mandat’ tidak pernah diatur. Sementara itu, DPR-Pemerintah tetap melanjutkan pembahasan mengenai Revisi UU KPK di Badan Legislasi. Hanya berselang beberapa jam, DPR-Pemerintah sepakat mengesahkan

⁵ Citra Hayati Nainggolan. Analisis Framing Pemberitaan Ganjar Pranowo Dalam Kasus Korupsi E-KTP (Tribun News, Jawa Pos, dan Suara Merdeka Periode Agustus – November 2015 dan Maret 2017). *Skripsi*. (Semarang: Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro, 2017).

⁶ <http://m.detik.com/news/berita/d-4709596/superkilat-ini-kronologi-13-hari-dpr-jokowi-revisi-uu-kpk> diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 18:51 WIB

⁷ Ibid

Revisi UU KPK ke rapat paripurna. Tanggal 17 September 2019, Revisi UU KPK disahkan di rapat paripurna DPR.⁸

Alasan peneliti memilih pemberitaan Revisi UU KPK selain menjadi *trending topic* di berbagai media *online* juga berita tersebut menimbulkan kontroversi dan banyak kejanggalan bahkan di tolak oleh kalangan publik sendiri. Karena Revisi UU KPK yang dirancang oleh DPR ini di nilai melemahkan lembaga anti rasuah Indonesia. Dalam periode 4 September 2019 - 17 September 2019 saja, media *online* detik.com memproduksi berita yang bertopik Revisi UU KPK sebanyak 530 berita. Hal ini tentunya mengingat berbagai macam kejadian yang muncul pada bulan tersebut sehingga detik.com lebih banyak memproduksi berita yang berkaitan dengan Revisi UU KPK secara terus menerus.

Detik.com adalah portal berita dan artikel daring salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Portal ini dinilai banyak kalangan sebagai portal terdepan dalam hal berita-berita baru (*breaking news*). Detik.com juga selalu aktif memberitakan isu-isu politik dalam membingkai dan mengemas sebuah berita dengan konsep yang berbeda. Detik.com merupakan media *online* dengan kekhasannya dalam menyajikan suatu berita secara ringkas dan santai. Gaya kepenulisannya yang begitu ringan sehingga mudah untuk dipahami. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung situs ini sejak Juli 1998 mencapai 30.000 *hits* per hari dengan sekitar 2.500 *users* (pelanggan Internet). Terakhir, *hits* detik.com mencapai 2,5 juta lebih per harinya. Selain itu, *page view* detik.com sekarang mencapai 3 juta per harinya dan menempati urutan ke empat tertinggi dari alexa.com untuk seluruh konten di Indonesia. Dan media *online* ini merupakan media dengan jumlah pengakses terbesar di Indonesia. Detik.com juga merupakan media massa *online* yang tidak memiliki media bentuk lain atau *web base*.

B. DEFINISI OPERASIONAL

1. Kekuasaan Politik

Kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang

⁸ Ibid

sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.⁹

Terdapat dua elemen penting dalam konsep kekuasaan politik, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani “*politeia*” (berarti kiat memimpin kota (*polis*)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi.

Kekuasaan politik dengan demikian berarti kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka. Jika seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik.

2. Pemberitaan

Berita sering didefinisikan sebagai laporan dari sebuah kejadian oleh para ahli. Definisi tersebut menyebabkan khalayak lupa bahwa sebuah berita sebenarnya dibuat untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan pemberitaan tersebut secara umum dapat dilihat dari pemilik media massa yang memuat berita tersebut.¹⁰ Berita merupakan suatu hal menarik yang ingin diketahui oleh orang-orang. Berita adalah hal yang mampu memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan. Berita berupa laporan kejadian yang disampaikan berdasarkan apa yang dilihat di lapangan.

3. Media *Online*

Secara teknis atau “fisik”, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media *online* adalah portal, website (situs web termasuk blog dan

⁹ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 31.

¹⁰ Yusuf Zainal Abidin, *Metode Penelitian Komunikasi, Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 257.

media sosial seperti facebook dan twitter), radio *online*, TV *online*, *email*.¹¹

Media *online* secara umum diartikan segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet. Media *online* juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*. Pengertian media *online* secara khusus terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Detik.com merupakan situs berita dari media *online* yang menyajikan informasi-informasi terbaru dengan cepat dan mudah untuk diakses khalayak.

4. Analisis Framing

Analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan *framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson pada tahun 1955. Dahulu, *frame* diartikan sebagai kerangka konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir politik, kebijakan dan wacana, serta menyediakan kategori-kategori yang standar untuk mengapresiasi realitas. Kemudian dikembangkan lebih dalam oleh Goffman pada tahun 1974, yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.¹²

Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang

¹¹ Asep Syamsul, M.Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO dan Tips Media Sosial)*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 31.

¹² Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 162.

ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.¹³

Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar, yaitu: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam *framing* berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Dibalik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang akan ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita.¹⁴

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana media detik.com membingkai pemberitaan Revisi UU KPK?”

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana media *online* detik.com membingkai pemberitaan Revisi UU KPK.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan mengenai pembedaan terhadap berita Revisi UU KPK yang dilakukan oleh media *online*. Di sisi lain, semoga penelitian ini dapat mempermudah dan membantu penelitian lain yang nantinya bisa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah penelitian khususnya bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi bagi khalayak mengenai bagaimana suatu media dalam mengemas suatu pemberitaan. Pengemasan dalam suatu berita dilakukan tidak hanya berdasarkan isu yang berkembang tetapi juga sudah

¹³ Ibid, hlm. 162.

¹⁴ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 163.

melalui tahapan konstruksi yang dilakukan oleh suatu media. Dan bagi penelitian berikutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk problematika yang sama maupun berbeda.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang analisis framing telah banyak dilakukan dalam ranah Ilmu Komunikasi. Tinjauan pustaka ditujukan agar penelitian tidak memiliki kesamaan dalam segala hal termasuk objek penelitian ataupun permasalahan yang akan diteliti. Selain itu juga digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian yang sudah ada.

Pertama, skripsi Fairuz Ilham Magribi, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2019. Skripsi dengan judul “*Analisis Framing Pemberitaan (Isu Penyerangan Ulama di Indonesia dalam Harian Kompas.com dan Republika.co.id Periode Februari-April 2018)*”.¹⁵ Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana bingkai pemberitaan Isu Penyerangan Ulama di Indonesia Periode Februari-April 2018 dalam harian Kompas.com dan Republika.co.id. Dalam penelitiannya menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Kesimpulan dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa Kompas.com sebagai media yang bersifat kebhinnekaan dalam membingkai pemberitaan bersifat netral dalam konteks keagamaan. Kompas.com lebih menonjolkan fenomena yang terjadi sebagai isu hoaks atau bohong secara keseluruhan yang dilakukan di media sosial dengan tujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan motif politik. Sementara bingkai berita yang dilakukan oleh Republika.co.id cenderung lebih mengutamakan kepentingan umat dengan menuliskan pemberitaan yang tidak lepas dari agama Islam. Republika.co.id lebih menyoroti sikap dan peran kinerja pihak pemerintah khususnya kepolisian dalam menindaklanjuti kasus yang terjadi sebagai permasalahan yang lebih difokuskan. Persamaan yang dilakukan penulis adalah sama-sama

¹⁵ Maghribi, Fairuz Ilham. Analisis Framing Pemberitaan (Isu Penyerangan Ulama di Indonesia dalam Harian Kompas.com dan Republika.co.id Periode Februari-April 2018). *Skripsi*. (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, 2019).

menggunakan analisis *framing* pada pemberitaan media *online*. Sedangkan perbedaannya adalah model analisis *framing* yang digunakan oleh Fairuz Ilham Magribi adalah perangkat *framing* Robert N. Entman.

Kedua, skripsi Sekarini Ashri Fitria, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019. Dengan skripsi yang berjudul “*Analisis Framing Pemberitaan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Presiden 2019 di Liputan6.com dan Tempo.co*”.¹⁶ Tujuan penelitian tersebut adalah memahami bagaimana pemberitaan deklarasi kampanye damai Pemilihan Presiden 2019 dipresentasikan di Liputan6.com dan Tempo.co. Dalam penelitiannya menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Kesimpulan dari penelitiannya adalah dalam pemberitaan yang termuat dalam Liputan6.com menekankan bahwa yang ditekankan dalam kampanye kali ini adalah kampanye tanpa hoaks dan anti-SARA. Liputan6.com juga tidak menunjukkan keberpihakan politik terhadap pasangan capres dan cawapres tertentu. Sehingga berita yang disajikan dapat terlihat netralitasnya. Sedangkan dalam Tempo.co menyampaikan bahwa deklarasi kampanye damai kali ini mengusung tema “kampanye yang damai, demokratis, dan bermartabat”. Tempo.co tidak menyebutkan poin tanpa hoaks dan anti-SARA seperti yang dijabarkan oleh Liputan6.com. Persamaan yang dilakukan penulis adalah sama-sama menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya, Sekarini Ashri Fitria menggunakan Liputan6.com dan Tempo.co, sedangkan penulis menggunakan Kompas.com dan Detik.com

Ketiga, skripsi Fahmi, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016. Dalam skripsinya berjudul “*Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka dan CNN Indonesia dalam Isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebar Paham Radikalisme*

¹⁶ Fitria, Sekarini Ashri. Analisis Framing Pemberitaan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Presiden 2019 di Liputan6.com dan Tempo.co. *Skripsi*. (Surabaya: Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

oleh BNPT".¹⁷ Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perbedaan pbingkaian yang dibuat oleh Rakyat Merdeka Online dan CNN Indonesia Online terkait pemberitaan penetapan 19 pondok pesantren yang terindikasi mengajarkan paham radikalisme oleh BNPT. Penelitiannya menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Kesimpulan dalam penelitian tersebut bahwa CCN Indonesia dan Rakyat Merdeka sama-sama menganggap ada pondok pesantren yang menjadi tempat penyebaran paham radikalisme khususnya mengarah kepada terorisme. Namun Rakyat Merdeka lebih gencar dalam memberikan isu pesantren radikal ini. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis *framing* pada pemberitaan media *online*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah model analisis *framing* yang digunakan oleh Fahmi adalah perangkat *framing* Robert N. Entman. Selain itu, subjek penelitian yang diambil juga berbeda, yaitu Fahmi menggunakan situs berita CNN Indonesia Online dan Rakyat Merdeka Online.

G. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu).¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionisme. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi merupakan hasil dari konstruksi. Konsentrasi dari analisis ini adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi dibentuk.

Menurut Berger, realitas tidak dibentuk secara ilmiah. Tetapi karena dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman yang semacam ini, jadi realitas berwajah ganda atau plural. Setiap khalayak mempunyai

¹⁷ Fahmi. Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka dan CNN Indonesia dalam Isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebar Paham Radikalisme oleh BNPT. *Skripsi*. (Jakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 49.

konstruksi masing-masing atas suatu realitas. Selain plural, realitas juga bersifat dinamis.¹⁹

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan keilmuan ilmu komunikasi yaitu teknik analisis framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan kondisi fisik dan kondisi sosial berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya.²⁰ Jadi dalam penelitian ini tidak menggunakan angka atau statistik, akan tetapi menekankan pada data deskriptif yang bersifat kata-kata tertulis maupun lisan. Pada prinsipnya penelitian deskriptif dengan maksud untuk mendeskripsikan dengan rinci dan aturan tentang kedua objek penelitian, membangun kategori dan klasifikasi, serta memaparkan latar belakang dan konteks sebuah situasi.

Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing*, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah media *online* detik.com. Sementara yang menjadi objeknya adalah pemberitaan mengenai Revisi UU KPK.

4. Sumber Data

Data yang diambil untuk dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 16.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.105.

a. Sumber Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari pemberitaan pada media *online* detik.com.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data pendukung lainnya yang dapat dijadikan sumber bisa berupa dokumen, arsip, maupun data-data tertentu yang didapat oleh peneliti dari berbagai sumber.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang dilakukan adalah mengumpulkan teks-teks artikel dalam berita terkait pemberitaan Revisi UU KPK. Selain itu, peneliti menambah data-data yang digunakan melalui penghimpunan data-data, literatur dan kajian pustaka terkait permasalahan yang diangkat. Pengumpulan dokumentasi tersebut digunakan untuk memberikan gambaran dan informasi yang mendukung dalam menganalisis data pada penelitian ini. Penulis menggunakan sumber data primer pada media *online* detik.com yang memuat berita tentang Revisi UU KPK.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis *framing* model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki dengan menggunakan empat struktur besar, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik,

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

dan retorik. Struktur sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa –pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa- ke dalam bentuk susunan kisah berita. Struktur ini bisa diamati dari bagan berita (*headline* yang dipilih, *lead* yang dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip, dan sebagainya). Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa. Kemudian, struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih kecil. Sedangkan struktur retorik berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retorik melihat pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar, yang juga dipakai guna memberi penekanan pada arti tertentu.²²

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, penulis membagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN. Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II POLITIK MEDIA DALAM INDUSTRI PERS. Berisi mengenai Media dan Kebebasan Pers, Ideologi Media, Industrialisasi Media, Politik Berita, Framing Berita, dan Teknik Analisis Framing Berita.

BAB III DETIK.COM DAN POLITIK MEDIA. Berisi tentang Profil Media Detik.com, Struktur Kepemilikan Media, Ideologi Media, Pengelolaan Media, Afiliasi Politik Media, dan Keterlibatan Politik Media.

BAB IV DETIK.COM DALAM KONSTELASI POLITIK DAN IDEOLOGI MEDIA. Membahas tentang membahas hasil dari analisis

²² Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 175-176.

framing terhadap pemberitaan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam media detik.com.

BAB V PENUTUP. Berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

POLITIK MEDIA DALAM INDUSTRI PERS

A. MEDIA DAN KEBEBASAN PERS

1. Pengertian Media

Media berasal dari bahasa Latin *medium* yang berarti perantara, pengantar atau tengah. Dalam pengertian tunggal dipakai istilah *medium*, sedangkan dalam pengertian jamak dipakai istilah *media*. Kemudian istilah *media* digunakan dalam bahasa Inggris dan diserap ke dalam bahasa Indonesia, dengan makna sebagai alat komunikasi, perantara atau penghubung.²³ Media yang dimaksud dalam hal ini adalah media massa. Media massa merupakan hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa. Yang mana merupakan salah satu elemen penting dalam proses komunikasi massa.

Media massa menurut McQuail merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media massa juga dapat menjadi sumber dominan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, baik secara individu maupun kolektif, dimana media menyajikan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.²⁴

Dalam pengertian lain, menurut McLuhan media massa adalah perpanjangan alat indra kita. Melalui media massa kita memperoleh tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi. Untuk khalayak informasi itu dapat membentuk, mempertahankan, dan mendefinisikan citra.²⁵

Media massa sebagai sarana informasi adalah alat untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Berdasarkan bentuk media massa

²³ Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer (Sebuah Studi Komunikasi)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 89.

²⁴ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 3.

²⁵ Firsan Nova, *Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perubahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 204.

dapat dibedakan dari jenisnya, seperti media cetak, elektronik dan media baru, yaitu media *online*. Media cetak memiliki berbagai jenis, seperti buletin, koran, majalah, tabloid, dan *news letter*. Media elektronik terdiri dari radio dan televisi. Sedangkan media *online* merupakan media yang berbasis internet, baik itu website maupun radio dan televisi internet (*streaming*).

Shirley Biagi (2010:10) menyebutkan tiga konsep penting tentang media massa yaitu:²⁶

- a) Media massa adalah suatu bentuk usaha yang berpusat pada keuntungan.
- b) Perkembangan dan perubahan dalam pengiriman dan pengonsumsi media massa, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.
- c) Media massa senantiasa mencerminkan sekaligus mempengaruhi kehidupan masyarakat, dunia politik, dan budaya.

2. Pengertian Pers

Istilah pers atau *press* berasal dari istilah Latin *pressus* (tekanan, tertekan, terhimpit, padat). Pers dalam kosakata bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Belanda sebagai sebutan alat untuk mencetak.²⁷ Istilah pers sudah lazim diartikan sebagai surat kabar atau majalah bahkan sering juga dikaitkan dengan pengertian wartawan didalamnya.

Pengertian pers dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang merupakan menjadi dasar dari regulasi yang mengatur persoalan pers diartikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

²⁶ Shirley Biagi, *Media/Impact: Pengantar Media Massa*, (Jakarta: salemba Humanika, 2010), hlm. 10.

²⁷ Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 67.

Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian yaitu pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas adalah media cetak dan media elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat secara reguler dan berkelanjutan. Media elektronik dipilah ke dalam dua kategori, yaitu radio dan televisi. Sedangkan dalam pengertian sempit pers meliputi media cetak seperti surat kabar, majalah maupun buletin.²⁸

Dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 1999, pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Pers juga memiliki peranan sebagai: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

3. Kebebasan Pers

Istilah kebebasan pers atau bisa disebut dengan kemerdekaan pers dapat ditemukan beberapa kali dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tertulis bahwa “kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis”. Kemudian dalam Pasal 2 UU Pers tertulis, “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.” Kebebasan pers juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 disebutkan: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

²⁸ Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 68.

Kebebasan pers dalam arti yang seluas-luasnya adalah pengungkapan kebebasan pendapat secara kolektif dari hak berpendapat secara individu yang diterima sebagai sebagai hak asasi manusia. Menurut pandangan Unesco, masyarakat demokratis dibangun atas dasar konsepsi kedaulatan rakyat, dan keinginan-keinginan pada masyarakat demokratis itu ditentukan oleh opini publik yang dinyatakan secara terbuka. Hak publik untuk mengetahui seperti demikian merupakan inti dari kebebasan pers, sedangkan wartawan profesional, penulis dan produsen hanya pelaksana berlangsung. Tidak adanya kebebasan pers berarti tidak adanya hak asasi manusia.²⁹

Dengan demikian kebebasan pers bersumber dari kedaulatan rakyat dan milik rakyat, yang ditegakkan untuk kepentingan rakyat. Kebebasan pers ditegakkan sebagai perisai bagi rakyat dari kesewenang-wenangan negara dan atau pengusaha serta perisai rakyat dari pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, fondasi utama hak asasi manusia untuk hidup bermartabat adalah kemerdekaan berekspresi dan memperoleh informasi yang secara teknis hanya bisa terlaksana melalui kebebasan pers.

Pasal 28 UUD 1945 telah menjamin kebebasan memperoleh informasi, dan atau kemerdekaan pers, serta kemerdekaan penafsiran bahwa politik secara konstitusional. Implementasi atas pasal itu mengandung penafsiran bahwa yang diamanatkan oleh pasal 28 adalah undang-undang yang menetapkan kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Penjabaran atas pasal itu diterbitkan pula berbagai peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik Wartawan Indonesia oleh Dewan Pers. Kendati pun pasal 28, khususnya pasal 28F, telah memberi jaminan kebebasan pers, akan tetapi bukan berarti kebebasan tersebut dapat dilaksanakan tanpa norma atau nilai-nilai.³⁰

²⁹ M. Ridlo 'Eisy, *Peranan Media Dalam Masyarakat, Kemerdekaan Pers Fondasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers, 2007), hlm. 60.

³⁰ Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 144.

Kebebasan pers harus diikuti dengan tanggung jawab insane pers, yaitu dengan mempertimbangkan hak bebas dari warga Indonesia yang lainnya. Kalau pers tetap berperanan menjalani sisi buruknya, maka pertanyaan besar yang muncul adalah, untuk siapa "kebebasan" itu sebenarnya, masyarakat luas atau insane pers sendiri secara monopoli. Dengan demikian, kebebasan pers bukan dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan pers itu sendiri, melainkan kepentingan publik dan kepentingan rakyat. Namun, karena publik tidak mungkin bisa mengakses informasi secara langsung – walaupun sebenarnya boleh, karena merupakan salah satu hak sipil – maka diperlukanlah pers, yaitu pers yang bebas. Bukan bebas dalam arti kata "semaunya sendiri" melainkan bebas mengakses informasi, bebas meliput, bebas menulis dan menyatakan pendapat secara tanggung jawab.³¹

B. IDEOLOGI MEDIA

Para ahli dalam memaknai kata ideologi memiliki berbeda pandangan, sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Gramsci memaknai ideologi sebagai historis. Menurutnya, ideologi harus menjadi suatu kesadaran kolektif yang mampu mengakomodasikan kepentingan kelompok lain dan menarik kelompok lain ke kelompok "penghegemoni".³² Marx menggambarkan ideologi sebagai sarana yang digunakan untuk ide-ide kelas yang berkuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat sebagai suatu yang alami dan wajar. Ideologi ini menjaga masyarakat berada dalam kesadaran palsu, kesadaran manusia tentang siapa dirinya, bagaimana mereka berelasi dengan bagian lain dari masyarakat, dan pengertian kita tentang pengalaman sosial dihasilkan oleh masyarakat dan lingkungan tempat kita dilahirkan.³³

Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (*Weltanschauung*). Secara umum ideologi merupakan sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada

³¹ Ibid, hlm. 144.

³² Syaiful Arif, *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*, (Malang: Averreos Press & Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 68.

³³ John Fiske, *Cultural and Communication: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1990), hlm. 239.

seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang tidak hanya sekadar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setia pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.³⁴

Raymond William menamakan ideologi sebagai himpunan ide-ide yang muncul dari seperangkat kepentingan material tertentu atau secara lebih luas dari sebuah kelas atau kelompok tertentu.³⁵ Ia mengklasifikasikan penggunaan ideologi tersebut dalam tiga ranah. *Pertama*, sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau satu kelas tertentu. Definisi ini dipakai oleh kalangan psikologis yang melihat ideologi sebagai seperangkat sikap yang dibentuk dan diorganisasikan dalam bentuk yang koheren. *Kedua*, sebuah sistem kepercayaan yang dibuat - ide palsu atau kesadaran palsu - yang bisa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Yang dimaksud adalah seperangkat kategori yang dibuat dan kesadaran palsu dimana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain yang tidak dominan. Perangkat ideologi disebarkan ke dalam masyarakat sehingga akan membuat kelompok yang didominasi melihat hubungan tampak natural dan diterima sebagai kebenaran. Di sini, ideologi disebarkan melalui berbagai instrumen dari pendidikan, politik, hingga media massa. *Ketiga*, ideologi merupakan proses umum produksi makna dan ide. Ideologi disini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produksi makna.³⁶

Ketika media dikehendaki oleh berbagai kepentingan ideologis dibaliknya maka, ketika menjadi cermin realitas (*mirror of reality*). Media sering dituduh sebagai perumus realitas (*definer of reality*) sesuai dengan ideologi yang melandasinya. Beroperasinya ideologi dibalik media, tidak

³⁴ Ahmad Muttaqin. Ideologi Dan Keberpihakan Media Massa. *Jurnal Dakwah dan Komunika Vol. 5, No. 2.* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011).

³⁵ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 64.

³⁶ Acan Mahdi. Berita Sebagai Representasi Ideologi Media (Sebuah Telaah Kritis). *Jurnal Al-Hikmah Vol. 9, No. 2.* (Pontianak: IAIN Pontianak, 2015). hlm. 209.

dapat dipisahkan dari mekanisme ketersembunyian (*invisibility*) dan ketidaksadaran yang merupakan kondisi dari keberhasilan sebuah ideologi. Artinya, sebuah ideologi menyusup dan menanamkan pengaruhnya lewat media secara tersembunyi (tidak terlihat dan halus), dan ia merubah pandangan setiap orang secara tidak sadar.³⁷

Sebenarnya meskipun istilah ideologi dipergunakan dalam banyak arti, namun pada hakikatnya semua arti ideologi, menurut Magnis-Suseno dapat dikembalikan pada salah satu (atau kombinasi) dari tiga arti, yakni:³⁸

1. Ideologi sebagai Kesadaran Palsu

Dalam pandangannya, kata ideologi paling umum digunakan dalam arti “kesadaran palsu”. Kata ideologi mempunyai konotasi negatif, sebagai *claim* yang tidak wajar, atau sebagai teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi dianggap sebagai sistem berpikir yang sudah terkena distorsi, baik disadari maupun tidak. Biasanya ideologi sekaligus dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok yang berkuasa melegitimasi kekuasaannya secara tidak wajar. Kata ideologi dalam pengertian ini terdorong untuk menegaskan bahwa cita-citanya tidak ideologis dan tidak merupakan ideologi.

2. Ideologi dalam Arti Netral

Ideologi ini banyak ditemukan di negara-negara yang sangat mementingkan sebuah “ideologi negara”, misalnya negara komunis. Arti dari netral adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap-sikap dasar rohani sebuah gerakan, kelompok sosial atau kebudayaan. Dalam arti ini, nilai ideologi bergantung pada isi. Kalau isinya baik, ideologi itu baik, kalau isinya buruk (misalkan membenarkan kebencian), maka dia buruk.

³⁷ Mahpuddin. Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil Society. *Jurnal Academica Vol. 1, No. 2*. (Palu: Jurnal Academica Universitas Tadulako, 2009). hlm. 194.

³⁸ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 230.

3. Ideologi: Keyakinan yang Tidak Ilmiah

Arti yang ketiga ini bersifat netral, tetapi sebenarnya bernada negatif karena memuat sindiran bahwa ideologi-ideologi itu tidak rasional, diluar hal nalar, jadi merupakan kepercayaan dan keyakinan subjektif semata-mata, tanpa kemungkinan untuk mempertanggung jawabkannya secara objektif.

C. INDUSTRIALISASI MEDIA

Perkembangan media massa sejak munculnya era reformasi yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers kian menakjubkan. Istilah kebebasan pers menjadi salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pada masa inilah banyak orang-orang berlomba-lomba menginformasikan segala hal lewat media massa. Tak hanya itu, banyak perusahaan media-media massa baru yang didirikan, seperti media televisi, media radio dan media cetak termasuk media *online* yang banyak digandrungi masa sekarang ini.

Tercatat perkembangan media massa di Indonesia tahun 2017 diperkirakan ada sekitar 2.000 media cetak. Namun dari jumlah perkiraan tersebut hanya 321 media yang dapat disebut sebagai media profesional. Sedangkan media *online* (media siber) diperkirakan mencapai 43.300, tapi yang tercatat sebagai media profesional yang lolos syarat pendataan pada 2014 berjumlah 211 saja. Angka ini menyusut menjadi hanya 168 media *online* pada 2015. Selain itu, hingga akhir 2014 tercatat ada 1.166 media radio dan 394 media televisi. Pada 2015 jumlah media radio mengalami penyusutan menjadi 674 sedangkan televisi bertambah menjadi 523. Dari data tersebut, nampak media cetak surat kabar, media *online*, dan media radio mengalami penyusutan, sedangkan data yang bertambah adalah pada media televisi.³⁹

Dari data tersebut tentu akan menumbuhkan media massa sebagai sebuah industri yang secara hakikatnya sejak kelahiran media adalah sebagai industri. Dapat disebutkan juga kehadiran dan perkembangan media

³⁹ Djoko Waluyo. Kebebasan Pers Pada Era Reformasi. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 14, No. 1. (Jakarta: BPSDMP Kominfo, 2018). hlm. 7.

tidak pernah lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaannya hanya pada perkembangan fungsi dan teknologi yang digunakan. Media yang dulunya hanya menyebar luaskan informasi, tetapi sekarang diubahnya menjadi sebuah wahana usaha ekonomi atau bisnis. Industrialisasi media tidak lagi untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tetapi kegiatan industri di bidang ekonomi.

Perkembangan pers, baik dalam pengertian proses industrialisasi maupun sebagai industri, tidak mungkin dihindari. Dalam tataran tertentu merupakan kebutuhan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kebutuhan akan kecepatan melayani dan menyampaikan informasi, perkembangan berbagai jenis media baru, persaingan yang ketat, dan perkembangan pers sebagai bisnis menuntut sistem pengelolaan yang saintifik (*scientific*) dan efisien.⁴⁰

Industrialisasi media seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat menjadikan perusahaan media untuk membuat berbagai alat untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara praktis dan cepat, salah satunya dengan lewat dunia maya atau internet atau bisa disebut sebagai media *online*. Hal semacam ini memunculkan terjadinya konvergensi media massa, dimana satu perusahaan media bisa diakses dengan berbagai jenis media.

Selain konvergensi media massa, pengaruh industrialisasi media massa juga membuat adanya konglomerasi media. Konglomerasi media massa memungkinkan tumbuhnya konglomerat-konglomerat media yang membangun grup media yang dapat menjadi kekuatan besar yang dapat berpengaruh di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat. Konglomerasi media memungkinkan berkumpulnya berbagai jenis media massa dari cetak, audio, audio visual, maupun internet dalam satu group. Konglomerasi media memungkinkan adanya power di bidang politik, dan keuntungan yang besar di bidang ekonomi.

Industrialisasi media yang mengedepankan ekonomi dan terbentuknya konglomerasi media berpotensi berkurangnya objektivitas

⁴⁰ Bagir Manan, *Politik Publik Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2012), hlm. 247.

pemberitaan media, yang tentunya tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik yang mengatakan bahwa pemberitaan harus *cover both side*, yaitu mendengarkan pendapat tidak hanya dari satu sisi narasumber saja, tidak berpihak terhadap satu kelompok manapun.⁴¹ Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa konglomerasi media menjadikan seluruh media tidak bisa berimbang dalam menyajikan berita. Semua yang tersaji merupakan berita yang memihak pada pemilik media. Media hanya dijadikan boneka yang dapat dimainkan dengan leluasa oleh pemiliknya. Terlebih pada pemilik media yang menginginkan posisi lebih berkuasa di dalam ranah politik.

D. POLITIK BERITA

Salah satu fungsi sentral media massa di ruang publik menurut Dennis McQuail adalah fungsi korelasi sosial. Melalui berita dan opini yang dimuat secara reguler, media memandu publik menghubungkan berbagai realitas yang sebelumnya terpisah oleh faktor geografi dan psikografi, menjadi satu rangkaian yang bisa diikuti dan dipahami secara mudah. Kekuatan media dalam melakukan framing atas sebuah teks dan fakta memandu publik mengkorelasikannya ke dalam konteks ekonomi, sosial politik dan budaya pada kurun waktu tertentu.⁴²

Politik berita sebagaimana media komunikasi politik lainnya, oleh pelaku komunikasi baik politikus maupun wartawan sendiri ditujukan bagi pembentukan opini publik (*public opinion*), sikap khalayak terhadap isu politik yang dikomunikasikan. Kerangka pembentukan opini publik, media massa biasanya melakukan tiga kegiatan, yaitu menggunakan simbol-simbol politik (*language of public*), melaksanakan strategi pengemasan berita (*framing strategies*), dan melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*).⁴³

Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media adalah hasil dari para pekerja media mengkonstruksikan

⁴¹ Sri Hadijah Arnus. Industrialisasi Media Massa dan Etika Jurnalistik. *Jurnal Al-Munzir*, Vol. 7, No. 2. (Kendari: IAIN Kendari, 2014). hlm. 109.

⁴² Masduki. Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media dalam Pemilu 2004. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 1. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004). hlm. 77.

⁴³ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 4.

berbagai realitas yang dipilihnya, diantaranya realitas politik. Faktanya bahwa pekerja media adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksi. Pembuatan berita di media massa pada dasarnya tak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita.⁴⁴

Media dalam kehidupan politik sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bahkan dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Political Communication*, Brian McNair (2003) mengatakan bahwa terdapat lima peran ideal media dalam mewujudkan kehidupan demokratis.⁴⁵ Peran pertama media adalah memberikan informasi tentang apa yang terjadi, peran kedua adalah memberikan edukasi bagi masyarakat tentang hal yang terjadi di lapangan. Menurut McNair dituntut objektivitas jurnalis sebagai edukator dalam hal pemberitaan. Bahkan John Robert Hendricks dan Robert E. Denton juga mengatakan bahwa media berperan untuk membentuk, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi agar masyarakat memahami isu politik dan memiliki keterikatan dengan politik.

Peran media yang ketiga adalah sebagai wadah diskursus. Media menjadi peracik agenda politik yang memberikan informasi dan memilah isu yang pada akhirnya akan mempengaruhi opini publik. Peran media yang keempat adalah sebagai pemantau pemerintah (*watch dog*). Maksudnya adalah media juga memiliki peran untuk mengkritik pemerintah, baik itu kebijakan ataupun program-program yang dibuat oleh pemerintah. Peran kelima, McNair menyebutkan bahwa media juga berperan untuk mengadvokasi beberapa pandangan politik (*persuasion*) yaitu sebagai kanal partai politik untuk menyampaikan sudut pandangnya.

Kecenderungan atau perbedaan setiap media dalam memproduksi berita dapat diketahui dari pelapisan-pelapisan yang melingkupi institusi media. Shoemaker dan Reese menjelaskan terdapat beberapa faktor, yaitu:

⁴⁴ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 88.

⁴⁵ Vellayati Hajad. Media dan Politik (Mencari Independensi Media dalam Pemberitaan Politik). *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2*. (Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2016). hlm. 5.

ideologi, ekstra media, organisasional, rutinitas media dan individual yaitu pekerja media. Masing-masing faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor yang lainnya.⁴⁶

Pertama, faktor individual. Dalam melakukan konstruksi realitas, faktor ini sangat berpengaruh sebagaimana dia akan mengkonstruksi sebuah realitas yang dilihatnya di lapangan. Faktor tersebut diantaranya karakteristik pekerja media, latar belakang personal dan profesionalnya. Pengaruh sikap pribadi, nilai-nilai dan keyakinan dari seorang pekerja media, sikap yang dianggap sebagai latar belakang pengalaman pribadi. Orientasi profesional dan konsepsi peran yang dipegang, sehingga fungsi untuk mensosialisasikannya terhadap pekerjaannya.

Kedua, faktor rutinitas media. Berkaitan dengan keseharian dari mekanisme pembentukan berita. Pada setiap media massa memiliki kebijakan pemberitaan dan pengolahan berita tersendiri yang sudah menjadi ciri khas media tersebut. Kebijakan redaksional tersebut dioperasionalkan dalam mekanisme kerja redaksi yang dimulai dari proses perencanaan berita. Kenyataan juga menunjukkan mekanisme kerja redaksional dibatasi oleh hambatan waktu dan halaman, kedua batasan ini dianggap juga sebagai faktor yang mempengaruhi rutinitas. Di samping kedua hambatan tersebut, mekanisme kerja redaksional tersebut dipengaruhi dengan alur produksi berita, dimana sebuah berita yang terbentuk harus melalui proses *gatekeeping*, yaitu rangkaian penjaga gerbang yang muncul mulai dari jajaran reporter, redaktur hingga pemimpin redaksi.

Ketiga, faktor organisasi media. Karakter organisasi terdiri dari komponen kelembagaan organisasi itu sendiri, struktur organisasi hingga sistem keorganisasian yang diterapkan. Mengenai kelembagaan organisasi misalnya, aspek redaksional pemberitaan adalah bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi proses produksi berita. Unit lainnya seperti sirkulasi iklan merupakan aspek lain yang turut berperan dalam proses pengambilan keputusan redaksional.

⁴⁶ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 138.

Keempat, faktor ekstra media. Yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan media yang turut mempengaruhi proses produksi berita. Berkaitan dengan faktor ini, terdapat tiga aspek yang dipengaruhi, yaitu sumber berita media massa, sumber penghasilan media massa dan institusi lain di luar media massa seperti pemerintah, kalangan bisnis maupun keberadaan teknologi.

Kelima, faktor ideologi. Seringkali diartikan dengan kerangka referensi yang ada dalam masing-masing individu dalam melihat suatu realitas dan bagaimana individu tersebut menyikapi realitas tersebut. Melalui faktor ini, dapat dilihat kekuatan yang dominan di masyarakat dan sekaligus di media massa, sehingga kekuatan tersebut mampu berperan dalam penentuan agenda media tersebut.

E. FRAMING BERITA

Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas. Media menghubungkan dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa tersebut lebih mudah diingat oleh khalayak. Karenanya, seperti yang dikatakan Frank D. Durham, framing membuat dunia lebih diketahui dan lebih dimengerti. Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. Menurut pandangan subjektif, realitas sosial adalah suatu kondisi yang cair dan mudah berubah melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷

Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi

⁴⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 34.

realitas.⁴⁸ Ada beberapa definisi mengenai framing. Berbagai definisi tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut:⁴⁹

Tabel 1
DEFINISI FRAMING MENURUT PARA AHLI

Robert N. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi yang lebih besar daripada sisi yang lain.
William A. Gramson	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (<i>package</i>). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
David E. Snow dan Robert Benford	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti

⁴⁸ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 162.

⁴⁹ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 67-68.

	makna peristiwa.
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Dari tabel diatas, terdapat berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli. Meskipun berbeda-beda, namun dalam pengertian tersebut terdapat titik singgung utama yang definisi framing. Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Jadi, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media.

Ada dua aspek dalam framing.⁵⁰ *Pertama*, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam pemilihan fakta selalu terkandung dua kemungkinan, yaitu apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Penekanan aspek tertentu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Jadi pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain.

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dan dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa. Fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu diantaranya penempatan yang mencolok (menempatkan *headline* depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/

⁵⁰ Ibid, hlm. 69.

peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata atau gambar yang mencolok.

Elemen menulis fakta berhubungan dengan penonjolan realita. Pemakaian kata, kalimat atau gambar merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Jadi aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

F. TEKNIK FRAMING BERITA

Pada umumnya terdapat empat teknik mem-framing berita yang dipakai wartawan, yaitu: *cognitive dissonance* (ketidaksesuaian sikap dan perilaku), empati (membentuk “pribadi khayal”), *packing* (daya tarik yang melahirkan ketidakberdayaan), dan asosiasi (menggabungkan kondisi, kebijakan, dan objek yang sedang aktual dengan fokus berita). Sekurangnya ada tiga bagian berita yang bisa menjadi objek framing, yakni judul berita, fokus berita, dan penutup berita.⁵¹

Misalnya seorang wartawan ingin mem-framing berita tentang kekerasan terhadap perempuan dengan berempati pada korban, tidak berarti ia mesti melupakan kaidah jurnalistik yang paling elementer, seperti nilai berita, layak berita, dan bias berita. Artinya, mereka harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi semua kaidah itu secara seksama. Setelah tahapan itu dilalui, barulah ia melakukan framing terhadap berita. Judul berita di framing dengan menggunakan teknik empati yaitu menciptakan pribadi khayal dalam diri khalayak, sementara khalayak diangankan menempatkan diri mereka seperti korban kekerasan atau keluarga dari korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa.⁵²

⁵¹ Ana Nadhya Abrar, *Media dan Minimnya Semangat Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Pantau, 2000), hlm. 73.

⁵² Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 174.

Kemudian, fokus berita di framing dengan menggunakan teknik asosiasi, yaitu menggabungkan kebijakan aktual dengan fokus berita. Kebijakan yang dimaksud adalah penghormatan terhadap perempuan. Dengan menggabungkan kebijakan tersebut dalam fokus berita, khalayak akan memperoleh kesadaran bahwa masih ada kekerasan terhadap perempuan, sekalipun usaha untuk menguranginya sudah dilakukan oleh berbagai kalangan. Kesadaran ini diharapkan bisa memicu khalayak untuk ikut berperan serta dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, wartawan perlu mengetahui secara persis kondisi riil pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, penutup berita di framing dengan menggunakan teknik *packing*, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya untuk menolak ajakan yang dikandung berita. Apapun inti ajakan, khalayak menerima sepenuhnya. Sebab mereka tidak berdaya sama sekali untuk membantah kebenaran yang direkonstruksikan mereka.⁵³

Analisis framing dapat dilakukan dengan bermacam-macam fokus dan tujuan. Tentu saja karena hal ini berkaitan dengan berbagai definisi dan ruang lingkup framing itu sendiri yang cukup kompleks. Pan dan Kosicki memiliki dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan, yaitu konsepsi psikologi dan konsepsi sosiologi. *Pertama*, konsep psikologi, lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. *Kedua*, konsep sosiologis, lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Frame dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas diluar dirinya.⁵⁴

Pan dan Kosicki melalui tulisannya "Framing Analysis: An Approach to News Discourse" mengoperasionalisasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema

⁵³ Ibid, hlm. 174.

⁵⁴ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 252-253.

yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita – kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu – ke dalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks.⁵⁵

Tabel 2
KERANGKA FRAMING PAN DAN KOSICKI

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema berita	<i>Headline, lead</i> , latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5W + 1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Maksud kalimat, hubungan 5. Nominalisasi antarkalimat 6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti	Paragraf, proposisi
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafor 12. Pengendalian	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

1. Sintaksis

Sintaksis ialah suatu susunan atau frase dalam kalimat.

Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan

⁵⁵ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 175

dari bagian berita, yaitu *headline*, *lead*, latar informasi, sumber dan penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah struktur piramida terbalik yang dimulai dengan judul *headline*, *lead*, episode, latar, dan penutup.⁵⁶

- a) *Headline* merupakan aspek sintaksis dengan tingkat kemenonjolan tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita. *Headline* mempunyai fungsi framing yang kuat. *Headline* digunakan untuk menunjukkan bagaimana wartawan mengkonstruksi suatu isu.
- b) *Lead* adalah perangkat sintaksis lain yang sering digunakan. *Lead* yang baik umumnya membentangkan sudut pandang dari berita, menunjukkan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan.
- c) Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan wartawan. Seorang wartawan ketika menulis berita biasanya mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Latar umumnya ditampilkan di awal sebelum pendapat wartawan yang sebenarnya muncul.
- d) Kutipan sumber adalah bagian berita yang menekankan bahwa berita yang ditulis oleh wartawan bukan pendapatnya semata, melainkan juga pendapat orang lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Pengutipan sumber menjadi perangkat framing atas tiga hal. *Pertama*, mengklaim kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan mendasarkan diri pada klaim otoritas akademik. *Kedua*, menghubungkan poin tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang berwenang. *Ketiga*, mengecilkan pendapat tertentu yang dihubungkan dengan pandangan yang mayoritas sehingga pandangan tersebut tampak sebagai menyimpang.

⁵⁶ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 257-260.

2. Skrip

Laporan berita yang sering disusun sebagai suatu cerita. Karena dua hal, *pertama*, banyak laporan berita yang berusaha menunjukkan hubungan, peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. *Kedua*, berita umumnya mempunyai orientasi menghubungkan teks yang ditulis dengan lingkungan komunal pembaca. Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah pola 5W+1H (*who, what, when where, why, dan how*). Meskipun pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan, kategori informasi ini yang diharapkan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan.⁵⁷

3. Tematik

Bagi Pan dan Kosicki, berita adalah sama halnya seperti sebuah pengujian hipotesis mengenai peristiwa yang diliput, sumber yang dikutip, dan pernyataan yang diungkapkan. Struktur ini berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis. Bagaimana kalimat yang akan dipakai, bagaimana menempatkan suatu sumber dan menulis ke dalam teks berita secara keluruhan.⁵⁸ Perangkat dari struktur ini diantaranya:⁵⁹

- a) *Detail*, merupakan elemen yang berelasi dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang wartawan. Ia akan menampilkan secara lebih informasi yang dianggap menguntungkan dirinya atau citra yang baik.
- b) *Koherensi*, sebagai penataan secara rapi baik realitas dan gagasan, fakta, dan ide ke dalam satu untaian yang logis sehingga menjadikan mudah untuk dipahami yang terkandung didalamnya. Koherensi dapat ditampilkan melalui hubungan sebab-akibat dan bisa juga sebagai penjelas.

⁵⁷ Ibid, hlm. 260-261.

⁵⁸ Ibid, hlm. 262-264.

⁵⁹ Aswad Ishak, *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Aspikom, 2011), hlm. 130-132.

- c) *Bentuk kalimat*, adalah sisi pemakaian kalimat yang berelasi dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Bentuk kalimat tidak hanya menjadi persoalan teknis kebenaran atau bahasa, tetapi menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat.
- d) *Kata ganti*, digunakan untuk melakukan manipulasi bahasa dengan membuat suatu komunitas imajinatif agar berita terlihat menarik. Penulis menggunakan kata-kata yang berbeda dalam sebuah berita.

4. Retoris

Menggambarkan pilihan gaya atau kata yang akan dipilih untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. Struktur retorik digunakan untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dalam suatu berita. Struktur ini juga menunjukkan kecenderungan mengenai apa yang disampaikan dalam suatu berita adalah sebuah kebenaran. Ada beberapa elemen struktur retorik, yaitu:⁶⁰

- a) *Leksikon*, pemilihan dan pemakaian kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. Suatu fakta pada umumnya terdiri atas beberapa kata yang merujuk pada fakta. Pilihan kata yang dipakai tidak semata digunakan dengan apa adanya, tetapi secara ideologis menunjukkan pemaknaan seseorang terhadap fakta/realitas. Pemakaian kata seringkali diiringi dengan penggunaan label-label tertentu. Pemilihan kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu.
- b) *Grafis*, biasanya dalam pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran yang lebih besar. Termasuk pemakaian *caption*, *raster*, grafik, gambar, tabel untuk mendukung pentingnya suatu pesan atau gagasan yang ingin ditonjolkan.

⁶⁰ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 264-266.

- c) Metafora, penyampaian pesan menggunakan kata-kata kiasan maupun ungkapan. Disini metafora dimaksudkan sebagai ornament atau bumbu dari suatu berita. Penggunaan peribahasa, pepatah, ungkapan sehari-hari, bahalan ungkapan yang diambil dari ayat-ayat suci yang semuanya dipakai untuk memperkuat pesan utama.



BAB III DETIK.COM DAN POLITIK MEDIA

A. PROFIL MEDIA DETIK.COM

1. Gambaran Umum Detik.com

Gambar 1

Logo Detik.com



Detik.com adalah portal web yang berisi berita maupun artikel daring di Indonesia. Detik.com merupakan situs berita yang berbeda dari situs berita lainnya. Karena detik.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Detik.com lebih mengedepankan berita-berita baru atau *breaking news*.⁶¹

2. Sejarah Detik.com

Detik.com merupakan sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Detik.com hanya mempunyai edisi daring dan pendapatan dari media ini bergantung dari bidang iklan. Server detik.com sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, namun mulai daring dengan sajian lengkapnya pada 9 Juli 1998. Saat itu pula akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir media daring yang didirikan oleh Budiono Darsono (eks wartawan DeTik), Yayan Sopyan (eks wartawan DeTik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi.⁶²

Budiono secara tepat memilih nama detik.com karena terdengar ringkas, mudah diucapkan dan mudah diingat. Selain itu, dalam konteks makna yang berkaitan dengan waktu, detik adalah satuan yang terpendek. Kata detik jika digabungkan dengan .com (dot com) juga terdengar mudah dan akrab. Detik.com juga dipahami oleh khalayak waktu itu sebagai suatu yang identik dengan internet. Alasan lain nama itu dipilih juga karena detik.com dikonsep untuk menyampaikan berita-berita cepat

⁶¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/DetikCom> diakses pada 1 Juni 2020 Pukul. 15:48 WIB.

⁶² Ibid.

(*breaking news/ news in brief*). Para wartawan dipacu setiap detik untuk mengejar berita secepat mungkin. Tidak ada satuan waktu yang lebih kecil dan dengan demikian lebih cepat daripada detik, maka ditetapkanlah nama yang pas bagi media online ini adalah detik.com.⁶³

Pada awalnya peliputan utama media detik.com terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Baru setelah situasi politik mulai reda dan ekonomi mulai membaik, detik.com memutuskan untuk melampirkan berita hiburan dan olahraga. Dari situ kemudian tercetus keinginan untuk membentuk detik.com yang update-nya tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang dijual oleh media detik.com adalah *breaking news*. Dengan bertumpu pada *vivid description* (gambaran yang jelas) menjadikan detik.com melesat sebagai situs informasi digital paling populer di kalangan users internet.⁶⁴

3. Jumlah Pengunjung Detik.com

Perkembangan jumlah pengunjung detik.com sejak awal berdiri perharinya menerima 30.000 *hits* (ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs) dengan sekitar 2.500 *user* (pelanggan internet). Dan sembilan bulan kemudian, Maret 1999, *hits* per harinya naik tujuh kali lipat, tepatnya rata-rata 214.000 *hits* per hari atau 6.420.000 *hits* per bulan dengan 32.000 *user*. Pada bulan Juli 1999, naik lagi menjadi 536.000 *hits* per hari dengan *user* mencapai 40.000. Terakhir, *hits* detik.com mencapai 2,5 juta lebih per harinya. Selain perhitungan *hits*, detik.com masih memiliki alat ukur lainnya yang sampai sejauh ini disepakati sebagai ukuran yang mendekati seberapa besar potensi yang dimiliki sebuah situs. Ukuran itu adalah *page view* (jumlah halaman yang diakses). *Page view* detik.com sekarang mencapai 3 juta per harinya. Sekarang detik.com menempati posisi ke empat tertinggi dari situs alexa.com untuk seluruh konten di Indonesia.⁶⁵

⁶³ A. Sapto Anggoro, *Detikcom Legenda Media Online*, (Yogyakarta: MocoMedia, 2012), hlm. 2.

⁶⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/DetikCom> diakses pada 1 Juni 2020 Pukul. 15:48 WIB.

⁶⁵ Ibid.

4. Visi dan Misi Detik.com

Visi dan misi media daring detik.com, yaitu:⁶⁶

a. Visi Detik.com

Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan digital, baik melalui internet maupun selular/mobile.

b. Misi Detik.com

- 1) *Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.*
- 2) *Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk berkarier.*
- 3) *Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham.*

5. Situs Berita Detik.com

Media detik.com mempunyai 17 situs berita online, yaitu:⁶⁷

- a. detikNews (news.detik.com) berisi informasi berita politik peristiwa.
- b. detikFinance (finance.detik.com) memuat berita tentang ekonomi dan keuangan.
- c. detikFood (food.detik.com) berisi informasi tentang resep makanan dan kuliner.
- d. detikHot (hot.detik.com) berisi info gosip artis/celebriti dan *infotainment*.
- e. detikNet (inet.detik.com) memuat informasi teknologi informasi.
- f. detikSport (sport.detik.com) berisi info olahraga termasuk sepak bola.
- g. detikHealth (health.detik.com) memuat info dan artikel kesehatan.
- h. 20detik (tv.detik.com/20detik) memuat original konten video mulai dari *news* sampai *lifestyle*.
- i. detikFoto (foto.detik.com) memuat berita tentang foto.
- j. detikOto (oto.detik.com) memuat informasi mengenai otomotif.

⁶⁶ Ayu Laxmita Arini. Pembingkai Berita “Kartu Kuning Jokowi”. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 55.

⁶⁷ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/DetikCom> diakses pada 1 Juni 2020 Pukul. 15:48 WIB.

- k. detikTravel (travel.detik.com) memuat informasi tentang liburan dan pariwisata.
- l. detikEvent (event.detik.com) memuat *event-event* yang diadakan oleh dan bekerjasama dengan detik.com.
- m. detikForum (forum.detik.com) yakni tempat diskusi *online* antar komunitas pengguna detik.com.
- n. blogDetik (blog.detik.com) yakni tempat pengakses mengisi info atau artikel, foto, video di halaman blog pribadi.
- o. Wolipop (wolipop.detik.com) berisi informasi tentang wanita dan gaya hidup.
- p. Iklan Baris (iklanbaris.detik.com) berisi iklan yang langsung diisi konsumen.
- q. Pasangmata (pasangmata.detik.com) berisi informasi berita dari pengguna dan dimoderasi oleh admin.

B. STRUKTUR KEPEMILIKAN DETIK.COM

1. Kepemilikan Detik.com

Situs detik.com dahulu merupakan produk media yang dibuat oleh PT Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom). PT Agrakom didirikan oleh ke empat orang itu pada Oktober 1995 dan disahkan pada Januari 1996, dan bergerak pada bidang pembuatan web (*web services*). Pada 3 Agustus 2011 CT Corp mengakuisisi detik.com dari PT Agrakom. Chairul Tanjung yang selaku pemilik CT Corp membeli detik.com secara total (100 persen) dengan nilai US\$60 juta atau Rp 521-540 miliar. Setelah diambil alih, seluruh jajaran direksi diisi oleh pihak dari Trans Corp – sebagai perpanjangan tangan CT Corp di ranah media. Dan Komisaris Utama dijabat oleh Jenderal (Purn) Bimantoro, mantan Kapolri, yang saat itu juga menjabat sebagai Komisaris Utama Carrefour Indonesia, yang juga dimiliki oleh Chairul Tanjung. Sebelum diakuisisi oleh CT Corp, saham media detik.com dimiliki oleh Agranet Tiger Investment dan Mitsui & Co. Agranet yang memiliki saham 59% di detik.com, dan sisanya dimiliki oleh Tiger 39%, dan 2% milik Mitsui. Pemilik dari CT Corp sendiri, Chairul

Tanjung, adalah seorang pengusaha yang memiliki industri televisi yaitu Trans TV dan Trans 7. Media daring salah satunya Detik.com, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia.⁶⁸

2. Struktur Manajemen Detik.com

Adapun struktur manajemen dari Detik.com adalah sebagai berikut:⁶⁹

- Komisaris Utama : Drs. Raden Suroyo Bimantoro
- Wakil Komisaris Utama : Zainal Rahman
- Komisaris : 1) Sutrisno Iwantono
2) Calvin Lukmantara
- Direktur Utama : Budiono Darsono
- Direktur Sales dan Marketing : Nur Wahyuni Sulistiowati
- Direktur Entertainmet : Wisnutama K.
- Direktur IT : Andy S. Huzin
- Direktur Keuangan dan HRD : Warnedy

3. Struktur Redaksi Detik.com

Berikut adalah struktur organisasi dari media online detik.com yaitu:⁷⁰

Direktur Konten:

Alfito Deannova Ginting

Dewan Redaksi:

Alfito Deannova Ginting, Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno, Odillia Winneke, Sudrajat, Fajar Pratama, Fakhri Fahmi.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:

Alfito Deannova Ginting

Wakil Pemimpin Redaksi:

Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno

⁶⁸ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/DetikCom> diakses pada 1 Juni 2020 Pukul. 15:48 WIB.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ <https://m.detik.com/redaksi> diakses pada 2 Juni 2020 Pukul 10:30 WIB.

detiknews:

Fajar Pratama (Redaktur Pelaksana), Zulfi Suhendra (Wakil Redaktur Pelaksana), Herianto Batubara (Kepala Peliputan), Hestiana Dharmastuti, Danu Damarjati, Dhani Irawan, E Mei Amelia Rahmat, Elza Astarti Retaduari, Adham Khalid, Muhammad Fida Ul Haq, Andhika Prasetya, Arief Ikhsanudin, Ibnu Haryanto, Gibran Maulana, Ahmad Bil Wahid, Kanavino, Indra Komara, Audrey Santoso, Marlinda Oktavia, Yulida Mudistiara, Nur Azizah, M. Zhacky K, Pasti Liberti Mappapa, Eva Safitri, Matius Alfons, Dwi Handayani, Isal Mawardi.

detiknusanantara dan Internasional:

Ahmad Toriq (Redaktur Pelaksana), Jabbar Ramdhani, Rita Uli Hutapea, Novi Christiatuti Adiputri, Mindra Purnomo, Andhika Akbarayansyah, Edi Wahyono, Fuad Hasim, Zaki Alfarabi, Luthfy Syahban.

Biro Jawa Timur:

Budi Hartadi (Kepala Biro)

Surabaya: Fatichatun Nadiroh, Imam Wahyudiyanta, Nila Ardiani.

Biro Jawa Barat:

Erna Mardiana (Kepala Biro)

Bandung: Baban Gandapurnama, Mukhlis Dinillah, Tri Ispranoto, Wiwi Aviani, Moch. Solehudin, Dony Indra Ramadhan.

Biro Jawa Tengah:

Budi Rahayu (Kepala Biro)

Bayu Ardi Isnanto, Angling Adhitya Purbaya, Sukma Indah Permana, Ati Dirgawati, Aditya Mardiasuti.

Non Biro:

Chaidir Anwar Tanjung (Pekanbaru), Raja Adil Siregar (Palembang), Agus Setyadi (Aceh), Haris Fadhil (Medan), Noval Dhwinuari Antony (Makassar), M. Taufiqurahman (Makassar), Bahtiar Rifai (Banten).

detikfinance:

Angga Aliya ZRF (Redaktur Pelaksana), Hans Hendricus B Aron (Wakil Redaktur Pelaksana) Dana Aditiasari, Ardan Adhi Chandra, Eduardo Simorangkir, Fadhly Fauzi Rachman, Hendra Kusuma, Danang Sugianto, Sylke Febrina Laucereno, Trio Hamdani, Achmad Dwi Afriyadi.

detiksport:

Kris Fathoni Wibowo (Redaktur Pelaksana), Afif Farhan (Wakil Redaktur Pelaksana) Lucas Aditya, Mercy Raya, Mohammad Resha Pratama, Novitasari Dewi Salusi, Okdwitya Karina Sari, Rifqi Ardita Widiyanto.

detikhot:

Nugraha Rodiana (Redaktur Pelaksana), Indah Mutiara Kami (Wakil Redaktur Pelaksana) Asep Syaifullah, Delia Arnindita Larasati, Desi Puspasari, Devy Octafiani, Dicky Ardian, Maulidi Rismoyo, Prih Prawesti, Tia Agnes Astuti, Febriyantino Nur Pratama, Dyah Paramita Saraswati, Hanif Hawari, Atmi Ahsani Yusron, Pingkan Anggraini.

detikinet:

Fitraya Ramdahanny (Redaktur Pelaksana), Fino Yurio Kristo (Wakil Redaktur Pelaksana) Anggoro Suryo Jati, Rachmatunnisa, Josina, Adi Fida Rahman, Tri Agus Haryanto, Virgina Maulita Putri, Aisyah Kamaliah.

detikhealth:

AN Uyunpramudiarja (Redaktur Pelaksana), Firdaus Anwar (Wakil Redaktur Pelaksana) Friedalsyana Putri, Rosmha Widiyani, Khadijah Nur Azizah, Sarah Oktaviani Alam.

wollipop:

Eny Kartikawati (Redaktur Pelaksana), Hestianingsih (Wakil Redaktur Pelaksana) Daniel Ngantung, Kiki Oktaviani, Rahmi Anjani, Mohammad Abduh, Gresnia Arela, Anggi Mayasari, Vina Oktiani.

detikfood:

Odilia Winneke (Redaktur Pelaksana), Andi Annisa Dwi Rahmawati (Wakil Redaktur Pelaksana) Devy Setya, Dewi Anggraini, Sonia Permata.

detiktravel:

Dadan Kuswaraharja (Redaktur Pelaksana), Femi Diah (Wakil Redaktur Pelaksana) Johannes Randy, Wahyu Setyo Widodo, Ahmad Masaul Khoiri, Melissa Bonauli, Syanti Mustika, Elmy Tasya Khairally, Putu Intan.

detikoto:

Doni Wahyudi (Redaktur Pelaksana), M. Luthfi Andika (Wakil Redaktur Pelaksana) Angga Rahadiansyah, Ridwan Arifin, Rizki Pratama, Luthfi Ansori.

detikX:

Irwan Nugroho (Redaktur Pelaksana), Melisa Maiola, M Rizal Maslan, Syailendra Hafiz Wiratama.

detikfoto:

Dikhy Sasra (Redaktur Pelaksana) Rachman Haryanto, Agus Purnomo, Aries Suyono, Agung Pambudhy, Ari Saputra, Grandyos Zafna, Rengga Sancaya, M. Ridho Suhandi, Amanda Rahmadita, Pradita Utama.

20Detik:

Gagah Wijoseno (Redaktur Pelaksana Signature), Idham A. Sammana (Redaktur Pelaksana Daily), Fuad Fariz (Wakil Redaktur Pelaksana), Triono Wahyu Sudibyo (Wakil Redaktur Pelaksana) M. Abdurrosyid, Achmad Triyanto, Aji Bagoes Risang, Billy Triantoro, Deny Fitrianto, Didik Dwi, Esty Rahayu Anggraini, Ihsan Dana, Lintang Jati Rahina, Iswahyudy, Marisa, Isfari Hikmat, Muhammad Zaky Fauzi Akbar, Nugroho Tri Laksono, Okta Marfianto, Rahma Yoga Wedar, Raisha Anazga, Septiana Ledysia, Tri Aljumanto, Wirsad Hafiz, Abdul Haris, Clara Angelita, Yulius Dimas Wisnu, Mardi Rahmat, Gusti Ramadhan, Adrian Rachmadi, M. Hanif Mustafad, Edward Ferbriyanti K, M. Haykal

Harlan, M. Ramdoni, Johan Alamsyah, Yolanda Vista, Rahmadhanti Viani S, Sunandi Mimo, Monica Arum, Dinda Ayu Islami.

Redaktur Bahasa:

Habib Rifai, Hadi Prayuda, Heru Yulistiyani.

Special Content:

Erwin Daryanto (Redaktur Pelaksana), Niken Widya Yunita, Lusiana Mustinda, Puti Aini Yasmin, Rosmha Widiyani.

Research And Development:

Sudrajat (Redaktur Pelaksana), Deden Gunawan.

Engagement Content:

Meliyanti Setyorini (Head), Andry Togarma (SEO Specialist Section Head), Ardi Cahya Rosyadi, Marwan, M Fayyas, Sari Amalia, Adiasti Kusumaningtyas, Yasmin, Vanita Dewi, Regista Arrizky, Nita Rachmawati, M. Ade Trejana, Nograhany Widhi K, Tripa Ramadan, Galih Prasetyo, Dwi Arif Ikhwanto, Dedi Irawan, Reza Jatnika, Moch. Yanuar Ischaq, Gilar Dhanu.

Sekretaris Redaksi:

Marina Deviyanti (Head), M Sidik, Satika Putriana, Tisna Rias Pratiwi, Siti Nurhasanah, Eko Wahyudi, Alissya Mustika.

Alamat Redaksi:

Gedung Transmedia - Lantai 8-9 Jln. Kapten Tendean kav. 12-14A,
Jakarta Selatan, 12790

Telp: (021) 7918 7722 (Hunting)

Fax: (021) 7918 7727

Email: redaksi@detik.com

C. IDEOLOGI MEDIA DETIK.COM

Terdapat berbagai macam ideologi di dunia ini seiring dengan perkembangan pola pikir serta cara pandang manusia. Begitu halnya dengan media massa tentu memiliki ideologi yang diusung oleh media itu sendiri. Menurut Shoemaker dan Reese, objektivitas lebih merupakan ideologi bagi

jurnalis dibandingkan seperangkat aturan atau praktik yang disediakan oleh jurnalis. Dalam pandangan Tuchman, objektivitas adalah ritual bagi proses pembentukan dan produksi berita. Hal tersebut merupakan sesuatu yang dipercaya, menjadi bagian dari ideologi yang disebarkan oleh dan dari wartawan.⁷¹ Selain itu, media massa juga banyak dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media baik dalam hal sistem ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Yasraf Amir Piliang, media massa tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di balik media tersebut, khususnya kepentingan terhadap informasi yang akan disampaikan. Dalam perkembangan media, setidaknya ada dua kepentingan utama (eksternal media) yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan yang membentuk isi media yang berupa informasi yang disajikan dan makna yang ditawarkannya. Diantara dua kepentingan utama yang telah dijelaskan, terdapat kepentingan yang lebih mendasar yang bisa saja diabaikan, yaitu kepentingan publik. Media yang seharusnya berperan sebagai ruang publik sering diabaikan oleh kuatnya dua kepentingan tersebut.⁷²

Kapitalisme menjadi dasar ideologi didalam pengelolaan industri media massa dan implikasinya: (a). Para pemilik media senantiasa berupaya memperbesar jaringan usahanya, kemudian mengakumulasi keuntungan dan modal itu untuk kepentingan mereka, yang pada akhirnya sering bertentangan dengan tuntutan dan kebutuhan publik; (b). Pelayanan media, akibat kapitalisme, menjadi terkonsentrasi hanya kepada publik yang potensial secara pasar, sehingga kelompok-kelompok minoritas yang lemah potensi pasarnya semakin terpinggirkan dan; (c). Publik semata-mata dilihat sebagai *consumer* bukan warga negara.⁷³

Detik.com yang merupakan salah satu media online yang paling lama berdiri cenderung memiliki ideologi nasionalisme. Pada jurnal yang ditulis oleh Woro Harkandi Kencana yang meneliti tentang “Konvergensi

⁷¹ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), hlm. 112.

⁷² Mahpuddin. Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil Society. *Jurnal Academica Untad, Vol. 1, No.2.* (Palu: Jurnal Academica Universitas Tadulako, 2009). hlm. 191.

⁷³ Hendra Alfani. Perspektif Kritis Ekonomi Politik Media Konglomerasi, Regulasi dan Ideologi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2.* (Jakarta: Universitas Budi Luhur, 2014). hlm. 21.

Media (Analisis Institusional Komunikasi Bisnis Pada Transmedia Group)”. Dalam hasil penelitiannya ia menulis bahwa Transmedia Group menganut Sistem Komunikasi Pancasila dimana pemilik media CT dengan visi dan misinya selalu menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada kualitas progamnya yang sesuai dengan nilai-nilai Persatuan Indonesia pada media yang dimilikinya.⁷⁴ Sistem Komunikasi Pancasila yang berbasis ideologi Pancasila disebutkan bahwa penyiaran memiliki tujuan dimana industri penyiaran tumbuh sesuai dengan fungsi ekonomi kepenyiaran di Indonesia. Selain itu perlu diperhatikan juga aspek penyiaran kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Sistem Komunikasi Pancasila dalam perkembangannya saat ini mulai bergeser pada sistem liberal dimana program pemberitaan media yang berkualitas kalah saing dengan program yang menjadi keinginan pasar. Ranah publik mulai menjadi santapan media dan kecaman terhadap pemerintah, pejabat maupun partai politik semakin bebas diberitakan. Sehingga konten yang ditampilkan oleh media hanya konten yang secara ekonomi mendatangkan rating tinggi untuk menarik pengiklan sebanyak mungkin. Selain itu, konflik kepentingan juga bisa muncul akibat persaingan yang ketat dengan kompetitornya. Akhirnya, media itu terjebak pada dilema antara harus menghadirkan tayangan yang melayani kepentingan publik tapi kemungkinan besar rugi atau menayangkan tayangan yang populer demi meraih kapital yang besar untuk mampu bertahan hidup.

D. PENGELOLAAN MEDIA DETIK.COM

Pengelolaan media adalah cara ataupun perbuatan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ada tiga tahap bidang yang menjadi penyangga berdirinya sebuah media. Ketiga bidang itu dalam melaksanakan kegiatannya harus saling berkaitan dan dalam penyelesaian pekerjaan masing-masing harus sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh media massa yang

⁷⁴ Woro Harkandi Kencana. Konvergensi Media (Analisis Institusional Komunikasi Bisnis Pada Transmedia Group). *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi (GELANGGANG) Vol. 1 No. 1*. (Jakarta: Universitas Persada Indonesia Y.A.I, 2014). hlm. 7.

bersangkutan. Ketiga bidang tersebut yaitu bidang redaksional, bidang percetakan, dan bidang usaha. Berikut penjelasannya:⁷⁵

1. Bidang Redaksi

Dalam bidang redaksi ada pembagian tugas pada masing-masing hierarki kedudukan. Pembagian tugas tersebut sebagai berikut:

a) Pemimpin Redaksi

Pemimpin redaksi atau bisa disebut juga pemred merupakan orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi redaksional media. Tugas utama seorang pemimpin redaksi adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaannya yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama (*head line*), berita pembuka halaman (*opening news*), menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya.

b) Sekretaris Redaksi

Sekretaris redaksi merupakan orang yang bertugas membantu pemred dalam hal administrasi keredaksian. Misalnya dalam hal surat menyurat, baik surat ke luar maupun surat dari luar (undangan). Hal yang menjadi catatan adalah sekretaris redaksi tidak dibenarkan langsung memberikan undangan kepada reporter melainkan harus melalui redaktur yang menaungi reporter tersebut.

c) Redaktur Pelaksana

Redaktur pelaksana adalah orang yang membantu pemred dalam melaksanakan tugas keredaksian. Jumlah redaktur pelaksana dalam masing-masing pererbitan tidaklah sama, bahkan ada yang tidak menggunakan redaktur pelaksana.

d) Redaktur

Redaktur merupakan petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman. Itu sebabnya, ada sebutan redaktur halaman atau redaktur bidang, ada juga yang menyebutnya dengan bidang kota, daerah, internasional, seni dan sebagainya. Redaktur ini bertugas

⁷⁵ Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2004), hlm. 15-34.

mengedit setiap tulisan yang disetorkan oleh para reporter. Banyaknya redaktur pada tiap penerbitan pers tergantung dengan banyaknya halaman atau bidang yang disajikan oleh penerbit pers tersebut.

e) Reporter

Reporter merupakan mereka yang bertugas mencari berita, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi berita untuk ditampilkan di media massa.

f) Koresponden

Korespondensi atau bisa juga disebut sebagai wartawan pembantu. Mereka adalah seseorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat atau ditunjuk oleh suatu penerbitan pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas wartawannya.

2. Bidang Percetakan

Percetakan pada perusahaan pers merupakan hal yang penting, tetapi tidak musti harus dimiliki oleh perusahaan tersebut. Adakalanya perusahaan pers mencetak pada perusahaan lain dan ada kalanya pers yang memiliki percetakan sendiri melayani percetakan penerbitan pers lain. Sama halnya dalam bidang redaksi, dalam percetakan juga ada kepengurusan yang menjalankan tugas masing-masing. Adapun susunannya sebagai berikut:

a) Pemimpin Percetakan

Pemimpin percetakan merupakan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap divisi di bidang percetakan.

b) Manajer Produksi

Manajer produksi yaitu orang yang membawahi tiga divisi dalam hal produksi di bidang percetakan. Ketiga divisi tersebut meliputi bidang pracetak, bidang cetak dan bidang perawatan mesin cetak.

c) Manajer Administrasi

Manajer administrasi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap bidang administrasi keuangan dan administrasi umum. Bidang administrasi keuangan merupakan bagian yang mengatur

biaya yang dihabiskan dalam percetakan sedangkan bidang administrasi umum bertugas dalam hal gaji dan kesejahteraan karyawan, keamanan kerja dan pemeliharaan gedung.

3. Bidang Usaha

Bidang usaha merupakan bidang yang mengurus perusahaan pers dalam orientasi pendapatan uang atau keuntungan sebanyak-banyaknya guna kesejahteraan semua karyawan. Bidang usaha inilah yang mengatur produksi, sirkulasi, iklan, keuangan, teknik, personalia, dan layanan (*costumer care*).

Pengelolaan Media Detik.com

Pengelolaan media online detik.com dalam bidang redaksi sendiri, secara keseluruhan terdapat alur atau mekanisme dalam pembuatan berita, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

a. Tahap Mencari Berita

- 1) Pencarian informasi oleh reporter dilapangan: pengamatan lapangan, wawancara narasumber, investigasi berita.
- 2) Pencarian melalui media lain: harian pagi, televisi, radio, media massa online nasional, dan global.
- 3) Informasi instansi resmi: informasi telepon, faksimili, email, dan jaringan website lembaga terkait pemberitaan (www.xyz.go.id, www.xyz.or.id, www.xyz.mil.id).
- 4) Informasi dari masyarakat (sumber informasi): surat pembaca, email masyarakat, telepon/faksimili masyarakat, sosial media (blog, microbloging, mailing list grup, facebook, atau forum online).
- 5) Informasi informal dari lembaga resmi: mendapatkan info-info tidak resmi dari lembaga semacam aparat dan petugas resmi yang mesti dikonfirmasi ke instansi resmi yang berwenang memberikan penjelasan, dan dikonfirmasi dengan data lapangan.

b. Tahap Pengolahan Berita

- 1) Penulisan. Setelah mendapatkan informasi dilapangan, wartawan memberikan laporan ke kantor pusat, yaitu ke penulis/ redaktur/

⁷⁶ A. Sapto Anggoro, *Detik.com Legenda Media Online*, (Yogyakarta: MocoMedia, 2012), hlm. 112-115.

redaktur pelaksana, dengan melalui saluran telekomunikasi. Materi berita berupa ketikan data melalui email atau *short messaging services* (SMS), materi berupa foto/ video melalui email.

2) Verifikasi. Setelah menyelesaikan tulisan hasil laporan wartawan lapangan, maka penulis menyampaikan ke rekannya yang bertindak sebagai verifikator. Tugas verifikator adalah memverifikasi laporan dari sisi:

- a) Bahasa: ejaan, kelengkapan kata (*typo*), kaidah, dan tata bahasa.
- b) Konteks: kesesuaian materi dengan berita yang dibahas.
- c) Kelayakan: apakah berita layak dipublikasikan atau tidak (memiliki nilai berita, penting, atau perlu).
- d) Keamanan: apakah cukup aman dari masalah SARA dan soal kerahasiaan negara.
- e) Penyiaran (Penayangan): setelah semuanya terpenuhi, bahwa ada berita, sudah melalui verifikasi, maka selanjutnya ditayangkan. Untuk menayangkan ini, bisa dilakukan oleh tim verifikator langsung dan selevel redaktur pelaksana ke atas.

c. Tahap Penayangan Berita

Terdapat tahap-tahap dalam penayangan penayangan berita, yaitu:

- 1) Mempersiapkan berita: pertama, penulisan/verifikator menyiapkan berita yang akan di tayangkan.
- 2) Membuka CMS: penulisan/ verifikator/ redpel/ wapemred/ pemred membuka halamn aplikasi isian yang disebut CMS (*content management system*) sejenis aplikasi berupa formulir isian online. Di detik.com aplikasi ini dikembangkan sendiri dan diberi nama jahex.
- 3) Menentukan lokasi: penulis/ verifikator/ redpel/ wapemred/ pemred melihat kesesuaian berita tersebut dari jenis beritanya, bila berita politik dan peristiwa masuk ke kantong detiknews (www.detiknews.com), bila berita ekonomi masuk ke detik Finance (www.detikfinance.com), untuk berita olahraga masuk ke detiksport (www.detiksport.com), untuk berita hiburan atau infotainment masuk

ke kantong detikhot (www.detikhot.com), untuk berita teknologi informasi dan internet termasuk gadget dan alat komunikasi masuk ke detikInet (www.detikinet.com), untuk berita surabaya dan jawa timur masuk ke detiksurabaya (surabaya.detik.com), untuk berita Bandung dan Jawa Barat masuk ke detikBandung (bandung.detik.com).

- 4) Berita utama (head line/ HL): selain menentukan lokasi berdasarkan kategori berita, juga ada pembagian berdasarkan besar kecilnya berita atau penting tidaknya berita. Untuk berita penting dan atau besar dimasukkan dihalaman utama (HL) yang otomatis selain muncul dihalaman utama detik.com (www.detik.com) sebagai induk dari seluruh kategori berita yang ada. Jika beritanya tidak besar/ penting tapi dianggap perlu, apabila tidak didrop maka akan muncul dihalaman kategori saja (detikNews, detikHot, detikSport, detikInet, detikFinance, detikSurabaya, dan detikBandung).

E. AFILIASI POLITIK MEDIA DETIK.COM

Kata afiliasi politik berasal dari kata Affiliate atau Affiliation. Afiliasi politik di definisikan sebagai penggabungan dari dua kelompok yang berlainan anggotanya yang kemudian menggabungkan diri menjadi satu.⁷⁷ W. Surya Endra juga mengemukakan bahwa afiliasi politik berasal dari kata Affiliate yang mempunyai pengertian yang memasukkan menjadi anggota. Selanjutnya beliau mendefinisikan afiliasi politik sebagai penggabungan antara dua kelompok kepentingan atau lebih untuk suatu tujuan politik tertentu. Afiliasi politik pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi:⁷⁸

1. Afiliasi politik yang bersifat defensive, yang mempunyai tujuan untuk membela diri terhadap serangan dari luar.
2. Afiliasi politik yang bersifat offensive, yang bertujuan untuk menyerang.

Afiliasi politik yang bersifat defensive, yaitu bergabung atau berhubungannya suatu kelompok kepentingan dengan kelompok kepentingan yang lain bertujuan untuk mendapatkan perlindungan. Biasanya bentuk kerja sama yang diadakan hanyalah bersifat situasional, dalam pengertian

⁷⁷ Amir Taat Nasution, *Kamus Politik*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 11.

⁷⁸ W. Surya Endra, *Kamus Politik Serta Penjelasanannya*, (Surabaya: Study Group, 1979), hlm. 23.

kerjasama hanya terjalin selama kepentingan kedua belah pihak masih dapat terjaga. Tetapi apabila kepentingan sudah terabaikan, hubungan yang telah terjalin tersebut tidak segan-segan untuk dibubarkan. Dengan kata lain lama tidaknya suatu kerja sama tergantung pada kesediaan kelompok kepentingan tertentu untuk melindungi kelompok kepentingan lainnya.⁷⁹

Sedangkan afiliasi yang bersifat offensive, adalah hubungan yang terjalin bermaksud untuk menyerang atau mempengaruhi. Agar pihak lain yang diserang atau dipengaruhi tersebut mau bergabung untuk mendukung kepentingan-kepentingan pihak yang mempengaruhinya. Afiliasi politik yang bersifat offensive ini biasanya tidak hanya berlaku untuk dua kelompok kepentingan saja, tetapi bisa lebih. Bahkan setiap ada peluang yang dianggap menguntungkan selalu dikejanya.⁸⁰

Beberapa tahun terakhir fenomena afiliasi politik media massa dengan partai politik banyak bermunculan terutama pada saat menjelang Pemilu. Pemilik media yang berafiliasi turut mempengaruhi pemberitaan program yang bermuatan politik pada kelompok tertentu. Bahkan dalam operasionalisasinya banyak digunakan sebagai alat untuk mengkritisi lawan kelompok politik lainnya. Media massa dewasa ini digunakan sebagai alat kampanye oleh golongan atau pemilik media itu sendiri. Selain itu, kelompok yang memiliki afiliasi dengan media massa akan mendapatkan perlakuan khusus dalam menayangkan iklan politiknya. Hal ini tentu akan menimbulkan independensi pada pelaku media. Pelaku media tersebut menjadikan tidak bisa bekerja secara independen. Mental dan harga diri terkait mengenai profesionalisme jurnalis menjadi menurun.

Media online detik.com yang dipayungi oleh Transmedia sebagai perusahaan media yang dimiliki Chairul Tanjung dimana dalam perusahaan tersebut terdapat beberapa media seperti Trans 7, Trans TV, CNN Indonesia dan detik.com, berdasarkan penelitian oleh Widya Rahmatia dalam hasil wawancaranya yang berjudul “Hierarki Pengaruh Media dalam Program Layar Pemilu Terpercaya di CNN Indonesia” mengemukakan bahwa Chairul

⁷⁹ W. Surya Endra, *Kamus Politik Serta Penjelasanannya*, (Surabaya: Study Group, 1979), hlm. 23.

⁸⁰ Ibid, hlm. 23.

Tanjung tidak memiliki relasi atau tidak berafiliasi politik dengan partai politik maupun tokoh politik. Dalam hal ini pemilik media lebih berorientasi pada profit yang di dapatkan dari bisnis media yang dimilikinya.⁸¹ Selain itu, pemilik media juga ingin mengembalikan nilai-nilai jurnalisme yang yang tidak dicampuri dengan keberpihakan dalam hal ini adalah *partisanship* yang dimiliki oleh media.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pemilik media detik.com, Chairul Tanjung, tidak memiliki afiliasi politik dengan manapun baik itu partai politik ataupun tokoh politik. Chairul Tanjung lebih berfokus pada perkembangan medianya sebagai tujuan berbisnis, yang menjadikan sinergi antar lini usaha CT grup dalam satu *holding* mempromosikan produknya. Disamping itu, ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada media dengan membangun kembali nilai-nilai jurnalistik tanpa campur tangan pihak lain.

F. KETERLIBATAN POLITIK MEDIA DETIK.COM

Keterlibatan politik bisa dipahami sebagai partisipasi politik (*political participation*), dikatakan bahwa konsep partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam proses politik secara sukarela. Warga negara disini menunjuk individu atau kelompok di dalam masyarakat dan tidak hanya orang-orang yang duduk dalam lembaga resmi tetapi bisa merujuk pada media. Sedangkan keikutsertaan dalam proses politik pada dasarnya adalah upaya memberikan tanggapan, saran, atau mengemukakan aspirasi atau tuntutan berkenaan dengan penjatahan sumber daya publik. Keterlibatan politik memiliki karakter pokok, yaitu keikutsertaan didasarkan pada prinsip sukarela bukan paksaan.⁸²

Abramson dan Hardwick membedakan partisipasi politik menjadi dua jenis, yaitu:⁸³

1. Partisipasi politik konvensional, berkaitan dengan pemilihan umum menunjuk hal-hal, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,

⁸¹ Widya Rahmatia. Hierarki Pengaruh Media dalam Program Layar Pemilu Terpercaya di CNN Indonesia. *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 163.

⁸² Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2015), hlm. 298.

⁸³ *Ibid*, hlm. 298.

ikut ambil dalam kegiatan-kegiatan kampanye, dan bergabung ke dalam kelompok kepentingan tertentu dan kemudian melakukan lobi-lobi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan menjadi kandidat.

2. Partisipasi politik non-konvensional, mencakup berbagai kegiatan yang cenderung melibatkan banyak orang dalam suatu kelompok massa dan kadangkala disertai dengan pelanggaran tertib hukum dan kekerasan.

Ditegaskan bahwa dalam kondisi normal, partisipasi politik pada umumnya dikaitkan dengan upaya untuk mengartikulasi kepentingan, tuntutan dan aspirasi sesuai ketentuan peraturan serta norma yang berlaku dalam konteks masyarakat demokrasi. Dalam situasi abnormal, kondisi yang ada dapat berbeda jauh, termasuk melewati batas-batas peraturan dan norma-norma. Hardwick karena itu mengatakan partisipasi politik sebagai cara-cara yang mana warga negara berinteraksi dengan pemerintah. Melalui partisipasi secara aktif dalam pemerintah, warga negara berupaya untuk membawa kepentingan-kepentingannya ke pejabat publik agar supaya kebutuhannya dapat dipenuhi.⁸⁴

Adapun partisipasi pada pemilik media ke dalam dunia politik tidak lain adalah keinginannya menjadi kandidat politik, bergabung ke dalam tim sukses dan mengikuti kegiatan kampanye untuk mendukung calon tertentu. Hal ini tentu dapat berdampak pada arah pemberitaan. Selain itu menjadikan tujuan dasar media untuk memberi informasi edukasi yang apa adanya ke khalayak menjadi pudar. Media massa atas kepentingan pemiliknya dijadikan sebagai alat untuk mencapai keinginan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam hal ini pemberitaan dalam suatu media dapat mengganggu pengembangan media massa itu sendiri dalam independensi dan netralitas jurnalistik.

Berdasarkan penelitian pemilik media detik.com, yaitu Chairul Tanjung merupakan pengusaha terkaya ke-7 di Indonesia. Dalam catatan politiknya pernah duduk di pemerintahan sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 19 Mei

⁸⁴ Ibid, hlm. 298.

hingga 20 Oktober 2014 yang menggantikan Hatta Rajasa yang mengundurkan diri karena menjadi calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 dengan dukungan dari Partai Gerindra, PAN, PKS, Golkar dan PPP.⁸⁵

Pada saat Pemilu 2019, Chairul Tanjung diberitakan masuk dalam bursa calon wakil presiden baik Jokowi maupun Prabowo. Berita ini dibaca oleh peneliti di media online RMOL.ID diterbitkan pada Senin, 18 Juni 2018 yang diberi judul “Ternyata, Chairul Tanjung Juga Diincar Demokrat”. Dalam berita tersebut, Chairul Tanjung tidak hanya masuk dalam bursa cawapres untuk capres Jokowi dan Prabowo saja. Namun, nama pendiri CT Corp itu sudah masuk dalam daftar cawapres yang diusung oleh Partai Demokrat. Hubungan dekat Demokrat dengan Chairul Tanjung sudah lama terjalin. Pendiri Trans Corp itu beberapa kali diangkat menjadi menteri kabinet semasa SBY masih menjabat menjadi Presiden RI.⁸⁶

Namun demikian, pada kenyataannya Chairul Tanjung hanya masuk ke dalam bursa dan tidak menjadi cawapres pada Pemilu 2019. Hal ini sudah jelas bahwa pemilik media tidak terlibat dalam kegiatan politik baik itu dengan partai politik maupun dengan tokoh politik. Tentu dengan tanpa keterlibatannya dengan politik menjadikan media ini dalam menyampaikan berita lebih independen dan seimbang. Karena tanpa adanya intervensi baik dari tokoh atau partai politik, seperti yang disampaikan CT selaku pemiliknya yang lebih memilih mengembangkan bisnisnya.

⁸⁵ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Chairul_Tanjung diakses pada 7 Juni 2020 Pukul. 20.01 WIB.

⁸⁶ <http://politik.rmol.id/read/2018/06/18/344424/Ternyata,-Chairul-Tanjung-Juga-Diincar-Demokrat-> diakses pada 29 Juni 2020 Pukul 17.44 WIB.

BAB IV
DETIK.COM DALAM KONSTELASI POLITIK
DAN IDEOLOGI MEDIA

A. IDEOLOGI DETIK.COM

1. Afiliasi Politik Detik.com

Afiliasi politik media terhadap partai politik ataupun tokoh-tokoh politik sekarang ini semakin marak terjadi apa lagi saat di tahun-tahun politik. Pada saat pemilu, media dijadikan sebagai alat untuk kampanye oleh afiliasinya. Media yang berafiliasi dengan salah satu tokoh politik misalnya, pasti akan memberitakan tokoh politik tersebut dengan kemas khusus. Dan sebaliknya, media dapat menjatuhkan lawan tokoh politiknya dengan memberitakan sisi buruknya. Hal ini menimbulkan media massa tersebut menjadi media partisan dan adanya liputan berita yang bias. Bias dalam pemberitaan dapat terjadi jika media partisan lebih menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa dan mengaburkan aspek lainnya.

Kecenderungan tersebut, membuat masyarakat tidak memperoleh informasi yang lengkap dan semestinya terhadap suatu peristiwa sehingga menyebabkan masyarakat kebingungan. Apabila terus menerus media massa begitu, maka masyarakat tidak dapat bersikap obyektif dalam menilai suatu peristiwa dan pada akhirnya masyarakat menjadi tidak percaya lagi media. Lebih dari itu, masyarakat menjadi terbiasa melecehkan pemerintahannya. Ditambah lagi independensi media dalam menyampaikan liputannya akan dipertanyakan nantinya.

Media detik.com yang merupakan media yang berbasis daring sejauh ini masih tetap berada dalam jalurnya dimana media menyampaikan pemberitaannya dengan profesionalismenya. Tidak adanya afiliasi atau relasi dengan siapa pun membuat media detik.com bisa dikatakan jauh dari kata media partisan. hal ini dapat dilihat dari pemberitaan di detik.com tidak dipengaruhi atau di intervensi oleh kepentingan-kepentingan politik yang ada, sehingga detik.com menjadi media yang relevan untuk menjalankan nilai-nilai jurnalisme yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara

Indonesia. tetap tunduk kepada kebijakan dan aturan-aturan jurnalisme yang ada di Indonesia.

2. Afiliasi Politik Pemilik Media

Dewasa ini, banyak pemilik-pemilik media di Indonesia terjun dalam dunia kepolitikan. Ada yang membangun partai politik sendiri ada juga yang bergabung dengan suatu tokoh politik terutama pada saat menjelang pemilihan umum. Keterlibatannya dalam politik dapat mempengaruhi independensi media karena pengaruh pemilik media. Pemilik media bisa saja mengintervensi ke ruang redaksi dan akan berdampak pada penayangan berita. Benar saja bahwa banyak pemilik media menggunakan media massanya sendiri sebagai alat untuk kampanye politik. Lebih dari itu, dalam penayangan beritanya pun isinya memihak pada tokoh politik afiliasinya.

Chairul Tanjung salah satu pebisnis sekaligus orang terkaya ke-7 di Indonesia sekaligus yang mempunyai bisnis dibidang media, yaitu Transmedia. CT sapaannya, tidak memiliki afiliasi politik dengan siapapun, melainkan menjalankan perusahaan media ini murni sebagai bisnis. Walaupun CT sempat digadang-gadang menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2019 kemarin berdasarkan hasil survey, dan masuk kategori sepuluh besar bahkan mengerucut ke lima besar. Dan berdasarkan data sebelumnya di salah satu media online, memberitakan Chairul Tanjung tidak hanya masuk dalam bursa cawapres untuk capres Jokowi dan Prabowo saja. Nama pendiri CT Corp itu juga masuk dalam daftar cawapres yang diusung oleh Partai Demokrat. Namun, CT menanggapi hal itu hanya sebagai isu saja.

Tidak adanya afiliasi politik baik dari media ataupun pemilik menjadi suatu hal yang positif dari media itu sendiri. Menjadikan media online detik.com dapat menjalankan sesuai dengan visi dan misi dari tersebut, dan jauh dari intervensi atau pengaruh pihak yang berafiliasi. Dalam menayangkan pemberitaannya tanpa ada unsur melemahkan dan menjatuhkan suatu kelompok. Media detik.com dengan tanpa afiliasi politik dari pemilik diharapkan membawa kepercayaan dan keberimbangan dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap media.

3. Nilai-Nilai Dasar Detik.com

Pada dasarnya media massa memiliki ideologi yaitu nilai-nilai dasar yang tertanam dalam media massa tersebut. Media massa yang seharusnya memiliki ideologi yaitu menyuguhkan berita informasi secara objektif. Karena objektif itulah yang nantinya akan berkembang menjadi hal yang sangat mendukung kelancaran komunikasi yang terdapat dalam media massa. Dengan adanya ideologi objektif, media massa dapat memberitakan suatu peristiwa yang akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, keobjektifan ideologi media mulai pudar karena pemilik medianya yang terjun ke politik misalnya. Akibatnya, media menyajikan berita secara memihak dan tidak netral.

Nilai-nilai dasar media detik.com selalu menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada setiap pemberitaannya yang sesuai dengan nilai-nilai Persatuan Indonesia seperti yang dikatakan pemilik media tersebut. Menganut Sistem Komunikasi Pancasila yang berbasis Ideologi Pancasila yang juga sebagai ideologi negara Indonesia yang didalamnya berisi bahwa media massa harus memiliki tujuan yang mana agar industri media tumbuh sesuai dengan fungsi ekonomi penyiaran Indonesia. Selain itu, selalu memperhatikan aspek kepenyiaran yang sesuai dengan berbangsa dan bernegara dan juga mempertimbangkan media massa sebagai lembaga ekonomi yang penting.

Pemilik media detik.com juga memiliki tujuan mengembalikan kembali media massa yang sesuai dengan nilai-nilai jurnalisme yang tidak diintervensi dengan kepentingan-kepentingan politik dalam hal ini adalah media yang partisan. Selain itu CT juga ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap media yang semulanya terpecah belah menjadi dua kubu pasca Pemilu begitupun juga media yang terpecah belah. Sebagai pemilik media CT lebih banyak membuat kemasan program yang menampilkan dirinya untuk tujuan bisnis, sebagai sinergi antar lini usaha CT group dalam satu *holding* mempromosikan produknya. Tentu sudah jelas bahwa media yang dimiliki CT Corp bertujuan untuk kepentingan bisnis dengan selalu memperhatikan nilai-nilai jurnalisme.

B. DETIK.COM DALAM INDUSTRI MEDIA

1. Orientasi Industri Media

Industri media sudah berkembang pada Era Reformasi dan menjadi titik melesatnya perkembangan bisnis media. Media yang didirikan sebagai tujuan untuk mencerahkan masyarakat, sekarang bergeser menjadi media yang sifatnya komersial dan sebagai bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Pertumbuhan industri media di Indonesia di dorong oleh kepentingan modal yang mengarah pada konglomerasi media. Sekarang ini, sudah banyak kelompok media besar yang mengendalikan hampir semua kanal media termasuk didalamnya media penyiaran, media cetak, maupun media online. Media massa pun sekarang berkembang menuju konsep kapitalis, yaitu media massa terikat dengan industri pasar atau istilah yang lebih luasnya dengan sistem kapitalis dan kapitalisme.

Kapitalisme menurut Karl Marx merupakan suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumber daya produksi vital yang mereka gunakan untuk meraih keuntungan yang maksimal.⁸⁷ Konglomerasi media massa merupakan suatu contoh yang nyata adanya unsur kapitalisme di Indonesia. Terdapat 12 kelompok media besar yang mengendalikan hampir semua kanal media, salah satunya adalah CT Corp yang memiliki bisnis medianya yang bernama Transmedia. Tidak hanya itu, CT Corp juga memiliki bisnis lain diantaranya Financial Service, Lifestyle and Entertainment, sumber daya alam, dan Properti. Bisa dikatakan bahwa CT Corp mempunyai bisnis yang tidak hanya dalam bidang media saja.

Transmedia juga melakukan konvergensi media dimana satu perusahaan media bisa diakses dengan berbagai jenis media komunikasi, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses media tersebut. Konvergensi media massa memungkinkan suatu media dapat diakses dengan beberapa cara, hal ini juga didukung oleh perkembangan jaringan internet yang semakin maju. Konvergensi Transmedia adalah bentuk kebijakan institusi dalam memproduksi dan mendistribusikan pesan di tengah persaingan industri media. Persaingan ketat antarmedia terjadi karena

⁸⁷ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 30.

perebutan porsi iklan sebagai pemasukan utama media dalam sistem regulasi yang berlaku di Indonesia.

Konvergensi produksi layanan dan sarana produksi antara media di Transmedia bersinergi menghasilkan program yang diminati oleh masyarakat terkait dengan *rating* dan *share*. Setiap kebijakan pada penyelenggaraan produksi pesan ditentukan oleh kebijakan institusi terutama kebijakan pemilik media.⁸⁸ Dijelaskan sebelumnya bahwa Chairul Tanjung pemilik media mendirikan media lebih berorientasi pada profit yang akan didapat dari bisnis medianya. Dan Transmedia dalam menjalankan bisnis medianya tetap berpegang pada aturan yang berlaku di Indonesia. CT juga lebih banyak membuat kemasan programnya yang menampilkan pemilik media tersebut sebagai untuk tujuan bisnis dan juga sebagai sinergi antar lini usaha CT Corp dalam satu induk perusahaan mempromosikan produknya.

2. Progres Lembaga Detik.com

Setiap media pasti memiliki tujuan dan arah guna kemajuan dari media massa tersebut. Media detik.com misalnya, dari visi media tersebut yaitu dimana detik.com menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan digital, baik melalui internet maupun selular/mobile. Misi media detik.com yang merupakan dari penjabaran dari visi media tersebut, yaitu memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk berkarier, memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham.

Sejak berdirinya media pada tahun 1998 hingga sekarang, bukan media detik.com tanpa progres. Media detik.com sudah menjelma menjadi media online yang paling populer di Indonesia. Dimana jumlah pengunjung yang membaca berita di media detik.com adalah sekitar 3 juta pengunjung. Bahkan jumlah halaman yang dikunjungi dari detik.com sendiri mencapai

⁸⁸ Woro Harkandi Kencana. Konvergensi Media (Analisis Institusional Komunikasi Bisnis Pada Transmedia Group). *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi (GELANGGANG) Vol. 1 No. 1*. (Jakarta: Universitas Persada Indonesia Y.A.I, 2014). hlm. 6.

3,4 juta lebih. Hal ini merupakan jumlah pengunjung yang sangat besar bagi sebuah media online itu sendiri. Dikenal dengan kecepatannya dalam update berita terbaru menjadikan media detik.com sebagai acuan bagi masyarakat dalam mengakses berita cepat.

Media detik.com juga membuka kesempatan untuk berkarier dalam media tersebut. Dalam website detik.com terdapat halaman karir, dimana dalam halaman web detik.com terdapat berbagai pilihan karir. Dengan demikian detik.com sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi bagian dalam media tersebut. Selanjutnya, progres media detik.com memberikan hasil optimal yang berkesinambungan dengan pemilik saham. Jelas saja, media detik.com menjadi situs yang populer di Indonesia dan itu pun dirasa sudah mendapatkan hasil yang optimal. Dengan kepopulerannya tentu saja akan mengundang masyarakat pasang iklan di media tersebut. Tidak heran dengan kepopulerannya itu, media detik.com dapat meraup penghasilan kurang lebih sebanyak Rp. 136 juta dalam sehari. Dan dikalikan selama sebulan mencapai sekitar Rp. 4 miliar berdasarkan dari situs web maxmonroe.com.

3. Komposisi Pemilik Modal

Media detik.com merupakan produk dari perusahaan PT Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom) yang bergerak di bidang pembuatan web (*web services*). Media detik.com memulai daring dengan sajian lengkap pada tanggal 9 Juli 1998, dan di tanggal tersebut ditetapkan menjadi tanggal resmi sebagai hari lahir detik.com. PT Agrakom dimiliki oleh 4 orang, yaitu Budiono Darsono, Abdul Rahman, Didi Nugrahadi, dan Yayan Sopyan sekaligus juga pendiri media detik.com, sebelum pada akhirnya media detik.com diakuisisi oleh CT Corp pada tahun 2011. Media detik.com dulu sahamnya dimiliki oleh tiga perusahaan berbeda, yakni saham media detik.com dimiliki oleh Agranet Tiger Investment dan Mitsui & Co. Agranet yang memiliki saham 59% di detik.com, dan sisanya 39% dimiliki oleh Tiger, dan Mitsui memiliki sahamnya 2%.⁸⁹

⁸⁹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/DetikCom> diakses pada 1 Juni 2020 Pukul. 15:48 WIB.

Pada tahun itulah media detik.com secara resmi berada dibawah kendali CT Corp. Chairul Tanjung, pemilik CT Corp membeli media daring detik.com secara keseluruhan atau 100%, artinya media detik.com dimiliki sepenuhnya oleh CT Corp. Dibeli dengan senilai Rp. 540 miliar, media detik.com mengalami banyak perubahan, termasuk dari jajaran direksinya. Seluruh jajaran direksinya diisi oleh pihak dari Transmedia yang merupakan perpanjangan tangan dari CT Corp di bidang media. Diantara media massa yang dibawah Transmedia, yaitu Trans 7 dan Trans TV. Komisaris Utama dijabat oleh Jenderal (Purn) Bimantoro, mantan Kapolri. Saat ini situs media daring detik.com telah menjadi salah satu situs ternama dan terbesar di Indonesia dilihat dengan jumlah pengunjungnya yang sangat besar. Pengunjung media detik.com mencapai 3 juta *hits* per hari, dan menjadi situs yang paling sering dibuka oleh pengunjung Internet di Indonesia. Sekarang media detik.com menempati posisi ke empat tertinggi dari situs alexa.com untuk seluruh konten di Indonesia.

C. REVISI UU KPK DALAM PERSPEKTIF MEDIA DETIK.COM

Revisi UU KPK kembali diusulkan oleh DPR pada sidang paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2019. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang tersebut anggota DPR yang hadir pada saat itu menyetujui akan pengesahan revisi UU KPK. Revisi UU KPK sempat dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas tahun 2015. Namun, waktu itu DPR bersama pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan mengenai revisi UU KPK. Hal itu banyak menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat karena masa jabatan DPR yang akan berakhir pada 30 September mendatang.

Revisi UU KPK banyak menjadi bahan perhatian yang menarik oleh media-media nasional maupun lokal, terutama media online detik.com. Media detik.com banyak memberitakan revisi UU KPK dari awal sidang rapat paripurna sampai akhirnya disahkan pada 17 September 2019. Diberitakan dalam detik.com revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ditolak oleh para guru besar, akademisi, koalisi masyarakat hingga oleh lembaga KPK sendiri

karena dianggap bisa melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Namun, hal itu tidak didengar oleh DPR dan pemerintah, dan tetap melanjutkan pembahasan hingga akhirnya disahkan.

Detik.com memberitakan kejanggalan-kejanggalan dalam pembahasan revisi UU KPK, yaitu dalam perancangan revisi UU KPK yang saat itu tengah digarap oleh DPR, tetapi pimpinan dari KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Padahal, lembaga KPK merupakan yang paling terdampak dengan revisi UU KPK itu. Hal itu sangat meprihatinkan karena pihak dari KPK pun tidak mengetahui isi dari draf revisi. Kemudian, revisi UU KPK disebut pada saat menjelang akhir dari masa jabatannya. Detik.com beropini DPR mengesahkan revisi UU KPK lewat rapat paripurna pada 5 September 2019. Sebelumnya, tidak ada tanda-tamda bahwa DPR akan melanjutkan revisi yang sempat menimbulkan kontroversi pada tahun 2017.

Selanjutnya, revisi UU KPK yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar prioritas, tetapi malah DPR tetap membahas yang tidak prioritas itu menjadi “prioritas”. Revisi UU KPK memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Namun, revisi UU KPK tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019. Seharusnya, DPR harus memasukkan suatu perancangan UU ke Prolegnas Prioritas dahulu sebelum akan membahasnya. Dan rapat paripurna DPR yang merupakan penentu yang paling penting bagi negara pada 5 September itu hanya dihadiri 70 orang anggota dewan saja. Itu artinya 490 orang dewan tidak menghadiri rapat. Daftar kehadiran sendiri yang biasanya dibacakan dalam pembukaan, tetapi tidak untuk kali ini. Jadi, anggota DPR secara keseluruhan berjumlah 560 orang. Namun, menurut pantauan langsung Cuma ada sekitar 70 orang saja, tentunya itu sudah menyalahi aturan. Terakhir, wacana terhadap revisi UU KPK sudah berkali-kali diusulkan DPR, tetapi selalu kandas karena penolakan dari berbagai pihak.

Detik.com juga membeberkan poin-poin yang dikhawatirkan dapat melemahkan KPK dalam UU yang baru. Terdapat beberapa poin, diantaranya yaitu: Lembaga KPK yang tidak lagi menjadi lembaga negara yang independen. Pembentukan Dewan Pengawas yang pada dasarnya konsep lembaga negara independen tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun

yang dijadikan titik fokusnya adalah membangun sistem pengawas. Dewan Pengawas yang ikut campur tangan eksekutif, pengangkatan Dewan Pengawas oleh Presiden dikhawatirkan melunturkan independensi penegakkan hukum di KPK. Karena kewenangan yang diperoleh oleh Dewan Pengawas sangat besar, hingga pada izin penyadapan, penggeledahan, sampai peyitaan.

Poin yang lain adalah KPK yang dapat menghentikan penanganan perkara. Artinya, dengan adanya pasal ini KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Poin ini bertentangan dengan Putusan MK yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. Selanjutnya, pegawai KPK merupakan aparatur sipil negara. Selama ini pegawai KPK tidak seluruhnya ASN, karena terdapat pegawai tetap KPK dan pegawai tidak tetap. Tentu dengan perubahan yang seperti ini diperlukan penyesuaian kondisi yang cukup panjang. Selain itu, poin pentingnya dalam konsep negara independen adalah salah satu cirinya kemandirian dalam sumber daya manusia. Jika disamakan status pegawaiannya tentu akan menghilangkan status lembaga negara independen.

Ada banyak berita dari detik.com yang memandang revisi UU KPK sebagai bentuk pelemahan lembaga antikorupsi di Indonesia. Tidak hanya media detik.com saja, bahkan dari kalangan guru besar, akademisi, koalisi masyarakat hingga oleh lembaga KPK sendiri karena dianggap bisa melemahkan KPK. Berawal dari terdapat kejanggalan DPR yang mengusulkan revisi UU tersebut pada rapat paripurna yang hanya dihadiri 70 anggota dari 560 anggota secara keseluruhan. Namun, DPR tetap mengebut revisi UU tersebut. Dan pada UU yang baru saat ini detik.com menilai terdapat beberapa poin yang berpotensi dapat melemahkan KPK.

D. ANALISIS FRAMING BERITA REVISI UU KPK

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama periode 4 September - 30 September 2019, media detik.com memproduksi berita yang bertopik revisi UU KPK sebanyak 530 berita. Hal ini tentunya mengingat berbagai macam kejadian yang muncul pada bulan tersebut sehingga media detik.com lebih banyak memproduksi berita yang berkaitan dengan revisi UU KPK secara terus menerus. Selanjutnya, akan memilih dan menimbang berita

selama periode tersebut yang dapat dijadikan menjadi bahan analisis, yang mana berita itu menjadikan sebagai bentuk pelemahan terhadap KPK dalam UU KPK yang baru. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 3
Daftar Berita Periode 4 – 17 September 2019

No	Hari/Tanggal	Judul	Keterangan
1	Rabu, 4 September 2019	Besok, DPR Gelar Paripurna Bahas Revisi UU KPK	Berita 1
2	Kamis, 5 September 2019	KPK Ungkap 9 Poin Draf Revisi UU yang Berisiko Lumpuhkan KPK	Berita 2
3	Jumat, 6 September 2019	Revisi UU KPK Dinilai Operasi Senyap Pelemahan Komisi Anti Rasuah	Berita 3
4	Sabtu, 7 September 2019	Pengamat Soal Revisi UU KPK: Isinya Bukan Menguatkan tapi Melemahkan	Berita 4
5	Minggu, 8 September 2019	Kasus Novel Baswedan-Revisi UU KPK Dinilai sebagai Upaya Pelemahan KPK	Berita 5
6	Selasa, 10 September 2019	Revisi UU KPK Disebut Bikin Anggota DPR Kebal Hukum	Berita 6
7	Kamis, 12 September 2019	Persetujuan Jokowi pada Revisi UU Bisa Jadi Awal Lonceng Redupnya KPK	Berita 7
8	Sabtu, 14 September 2019	Revisi UU KPK Dikritik Keras, Ini yang Sudah Dibahas DPR-Pemerintah	Berita 8
9	Minggu, 15 September 2019	ICW: Revisi UU KPK Serampangan dan Buru-buru	Berita 9
10	Selasa, 17 September 2019	Kejanggalan-kejanggalan dalam Pembahasan Revisi UU KPK	Berita 10

11	Selasa, 17 September 2019	Dukung Revisi UU KPK, Jokowi Dinilai Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi	Berita 11
----	---------------------------	---	-----------

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Pemberitaan Detik.com

1. Analisis Berita 1

Judul : Besok, DPR Gelar Paripurna Bahas Revisi UU KPK

Sumber : Detik.com. Rabu, 4 September 2019

Ringkasan :

DPR kembali mengusulkan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agenda resmi rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis (5/9) yang akan membahas mengenai pandangan fraksi terhadap perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 dan pengambilan keputusan menjadi RUU.

Tabel 4

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Besok, DPR Gelar Paripurna Bahas Revisi UU KPK
	<i>Lead</i>	Usulan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencuat lagi di DPR. Besok, DPR akan menggelar paripurna untuk menentukan kelanjutan pembahasan revisi UU KPK.
	Latar Informasi	Rapat paripurna membahas revisi UU KPK
	Kutipan Sumber	• Dalam agenda rapat meminta

		pandangan dari fraksi-fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi (Baleg) DPR tentang perubahan kedua atas UU KPK No. 30 Tahun 2002 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU atas usul DPR RI.
	Pernyataan/Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Kembali mencuatnya usulan revisi UU KPK No. 30 Tahun 2002 dan kelanjutannya akan dibahas pada rapat paripurna. • Revisi UU KPK sempat dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, namun ditunda atas kesepakatan DPR dan pemerintah.
	Penutup	Pernyataan penulis bahwa masa jabatan DPR yang berakhir pada 30 September.
Struktur Skrip	<i>What</i>	DPR RI kembali mengusulkan revisi UU KPK pada agenda rapat paripurna.
	<i>Where</i>	Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
	<i>When</i>	Kamis, 5 September 2019
	<i>Who</i>	DPR RI
	<i>Why</i>	Revisi UU KPK sempat dimasukkan ke Prolegnas 2015.

		Namun, dulu DPR dan pemerintah sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK.
	<i>How</i>	Dalam rapat paripurna nanti, fraksi-fraksi di DPR mengemukakan pendapatnya apakah revisi UU KPK akan disahkan menjadi RUU usulan DPR.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf awal berita berisi revisi UU KPK yang akan diusulkan DPR dalam rapat paripurna. Paragraf kedua, ketiga dan keempat membahas agenda rapat pengambilan keputusan revisi UU KPK menjadi RUU usulan DPR. Paragraf kelima dan terakhir ditutup dengan keterangan penulis bahwa pembahasan revisi UU KPK sempat dimasukkan ke Prolegnas 2015 sebelum akhirnya ditunda dan penulis juga memberikan keterangan masa jabatan DPR yang segera berakhir pada 30 September mendatang.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Mencuat

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Dari struktur sintaksis, terlihat pemberitaan ini memberitahukan kepada khalayak bahwa Besok atau pada 5 September 2019, DPR akan menggelar sidang paripurna dan akan mengusulkan revisi UU KPK. Hal tersebut bisa dilihat dari susunan kata pada judul berita. Dan pada *lead* berita diperjelas lagi hal yang serupa mengenai penentuan kelanjutan membahas revisi UU KPK pada rapat besok. Selain judul dan *lead*, kutipan sumber juga mempertegas kembali bahwa agenda rapat yang akan digelar dimana akan meminta pandangan dari fraksi terkait revisi UU yang akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU. Latar informasi berita masih sangat jelas yaitu pembahasan revisi UU KPK pada rapat paripurna.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip terlihat gambaran bahwa media detik.com memberikan gambaran mengenai usulan revisi UU KPK pada rapat paripurna. Unsur *what* yang menginformasikan bahwa DPR RI kembali mengusulkan revisi UU KPK pada agenda rapat paripurna. Unsur *why* menyajikan topik untuk kembali ke masa lampau dimana revisi UU KPK sempat dimasukkan ke Prolegnas 2015. Namun, dulu DPR dan pemerintah sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK. Unsur *how* menggambarkan kembali dalam rapat paripurna akan dilakukan pembahasan fraksi-fraksi di DPR mengemukakan pendapatnya apakah revisi UU KPK akan disahkan menjadi RUU usulan DPR.

3) Struktur Tematik

Dalam struktur tematik ini, paragraf demi paragraf dalam berita ini secara keseluruhan membahas revisi UU KPK yang diusulkan kembali pada rapat paripurna. Dijelaskan pula agenda rapat tersebut dan diceritakan bahwa sebenarnya revisi UU tersebut sempat akan dibahas, namun ditunda karena kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Begitupun pada paragraf terakhir detik.com menulis masa jabatan DPR yang hanya tinggal kurang dari sebulan. Artinya bisa saja maksud dari

paragraf tersebut terdapat kejanggalan mengenai usulan revisi UU KPK yang dibahas pada masa menjelang akhir jabatan.

4) Struktur Retoris

Dari struktur retoris ini dalam paragraf pertama menjelaskan usulan revisi UU KPK yang mencuat kembali di DPR yang dibahas pada sidang paripurna. Di dalam paragraf tersebut, terdapat kata “mencuat” artinya terdapat upaya penulis menonjolkan atau menekankan pada usulan revisi UU KPK kembali oleh DPR.

2. Analisis Berita 2

Judul : KPK Ungkap 9 Poin Draf Revisi UU yang Berisiko Lumpuhkan KPK

Sumber : Detik.com. Kamis, 5 September 2019

Ringkasan :

Lembaga KPK menggelar konferensi pers secara khusus guna menanggapi revisi UU KPK yang akan dibahas oleh DPR. KPK menjelaskan terdapat 9 poin yang dapat melumpuhkan KPK. KPK juga mengatakan bahwa posisinya berada di ujung anduk dan berpotensi mengganggu kinerja KPK.

Tabel 5

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	<i>KPK Ungkap 9 Poin Draf Revisi UU yang Berisiko Lumpuhkan KPK</i>
	<i>Lead</i>	Konferensi pers menanggapi revisi UU KPK yang bakal dibahas oleh DPR. Terdapat 9 persoalan di draf revisi UU yang berpotensi melemahkan KPK.
	Latar Informasi	Tanggapan KPK mengenai 9

		poin yang terdapat di draf revisi UU KPK.
	Kutipan Sumber	<p>Agus Rahardjo, Ketua KPK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 9 persoalan di draf revisi UU KPK yang berisiko melumpuhkan KPK • KPK berada diujung tanduk. • Agenda KPK berpotensi mengganggu kinerja KPK. • RUU KUHP dinilai berpotensi mencabut sifat khusus tindak pidana korupsi.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini dalam berita ini. Seluruh isi berita ditulis berdasarkan pernyataan narasumber.
	Penutup	9 poin yang dinilai berisiko melumpuhkan kinerja KPK.
Struktur Skrip	<i>What</i>	KPK menggelar konferensi pers khusus menanggapi revisi UU KPK
	<i>Where</i>	Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
	<i>When</i>	Kamis, 5 September 2019
	<i>Who</i>	Ketua KPK, Agus Rahardjo
	<i>Why</i>	Terdapat sembilan persoalan dalam draf revisi UU yang berisiko melumpuhkan KPK.

	<i>How</i>	Tidak ada dalam berita ini.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama dalam berita ini menginformasikan bahwa KPK menggelar konferensi pers. Dilanjutkan dengan keterangan ketua KPK. Dan ditutup dengan sembilan poin yang berisiko melemahkan KPK.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Melumpuhkan • Ujung tanduk

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Dilihat dari judul dan *lead* berita ini, terlihat keinginan penulis menekankan kata “lumpuh”. Kata tersebut dari pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang kemudian dijadikan judul dalam berita ini. Dimana dalam konferensi persnya KPK memberitahukan beberapa poin draf yang dapat melumpuhkan KPK.

Selanjutnya kutipan sumber dalam berita ini hanya menggunakan satu sumber, yaitu Agus Rahardjo selaku ketua KPK. Berita ini juga hanya berisikan kutipan-kutipan sumber yang menjelaskan beberapa poin yang dapat melumpuhkan KPK dapat mengganggu kinerja KPK. Ke sembilan poin yang itu tulis pada bagian penutup, hal dimungkinkan agar pembaca mengetahui 9 poin yang terdapat pada draf revisi UU KPK tersebut.

2) Struktur Skrip

Dari struktur skrip, dapat dilihat yang ingin dikisahkan penulis yaitu dalam unsur *what* konferensi pers KPK yang menanggapi revisi UU KPK. Unsur *who* Ketua KPK, Agus Rahardjo. Serta unsur *why*, unsur ini jelas Agus Rahardjo yang berpendapat terdapat poin-poin draf revisi UU yang berpotensi dapat melumpuhkan kinerja KPK.

3) Struktur Tematik

Secara tematik, berita ini memperlihatkan secara keseluruhan pernyataan Agus Rahardjo selaku Ketua KPK, menanggapi revisi UU KPK yang dilakukan DPR. Dan didalam draf revisi UU tersebut, terdapat poin yang dapat berdampak pada lemahnya lembaga antikorupsi tersebut. Paragraf pertama, penulis menjelaskan bahwa KPK menggelar konferensi menanggapi revisi UU dan juga isi dari tanggapan tersebut. Selanjutnya berita berisi tanggapan-tanggapan dari Ketua KPK. Dan di paragraf terakhir penulis menunjukkan beberapa poin yang dinilai dapat melumpuhkan KPK berdasarkan dari Agus Rahardjo, Ketua KPK.

4) Struktur Retoris

Pengamatan dari struktur retorik penulis menekankan dengan kata “lumpuh” dan “ujung tanduk” untuk menyampaikan pernyataan Agus Rahardjo yang menggambarkan bahwa lembaga KPK sedang berada dalam masa-masa yang darurat.

3. Analisis Berita 3

Judul : Revisi UU KPK Dinilai Operasi Senyap Pelemahan
Komisi Anti Rasuah
Sumber : Detik.com. Jumat, 6 September 2019
Ringkasan :

Masa jabatan DPR yang akan berakhir tiga pekan lagi, tiba-tiba mengusulkan untuk revisi UU KPK di penghujung masa tugasnya. Akademisi berargumen revisi UU KPK yang dilakukan DPR sebagai operasi senyap pelemahan KPK.

Tabel 6

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	<i>Revisi UU KPK Dinilai Operasi Senyap Pelemahan Komisi Anti Rasuah</i>

	<i>Lead</i>	DPR tiba-tiba mengusulkan revisi UU KPK di masa penghujung tugas dimana akan berakhir tiga pekan lagi.
	Latar Informasi	Argumen dari makna operasi senyap pelemahan KPK dari revisi UU KPK
	Kutipan Sumber	<p>Tim Peneliti Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hemi Lavour Fernandes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasi senyap pelemahan KPK disebut revisi UU KPK • RUU KPK tidak masuk dalam Prolegnas 2019 • Kewajiban KPK memberikaan laporan kepada lembaga eksekutif dan legislatif, rentan untu diintervensi oleh kekuasaan lain dan mencedari indepedensi KPK. • Pembentukan Dewan Pengawas yang seharusnya tidak dibutuhkan • Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas menolak segala bentuk pelemahan KPK.
	Pernyataan/Opini	Tidak ada opini dalam berita ini. Seluruh isi berita ditulis berdasarkan pernyataan

		narasumber.
	Penutup	Pernyataan Hemi yang menolak tegas segala bentuk pelemahan KPK serta Presiden Jokowi yang harus mengambil sikap untuk segera menghentikan pembahasan revisi UU KPK.
Struktur Skrip	<i>What</i>	DPR tiba-tiba mengusulkan revisi UU KPK di penghujung masa jabatannya.
	<i>Where</i>	Siaran pers detik.com
	<i>When</i>	Jumat, 6 September 2019
	<i>Who</i>	Tim Peneliti Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hemi Lavour Fernandes
	<i>Why</i>	Dinilai tidak taat terhadap ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011
	<i>How</i>	Tidak ada dalam berita ini.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paaragraf secara keseluruhan membahas satu tema, yaitu argumen Tim Peneliti Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hemi Lavour Fernandes terhadap operasi senyap pelemahan KPK revisi UU KPK.
Struktur Retoris	Kata, idiom,	<ul style="list-style-type: none"> • Foto ilustrasi berita • Penggunaan kata “operasi

	gambar/foto, grafik	senyap” dalam judul berita.
--	---------------------	-----------------------------

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Judul yang dipakai dalam berita ini yaitu “Revisi UU KPK Dinilai Operasi Senyap Pelemahan Komisi Anti Rasuah” diambil dari pernyataan oleh seorang akademisi yang menolak tegas revisi UU KPK. Penulis membawa pembaca dalam satu pandangan bahwa DPR yang telah melakukan kesalahan besar dan melanggar aturan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang secara tiba-tiba mengusulkan revisi UU KPK di akhir masa tugasnya dan *lead* dalam berita ini menyatakan demikian.

Latar informasi menjelaskan argumen dalam judul berita tersebut beserta dengan kutipan sumber yang secara keseluruhan adalah kutipan dari Hemi Lavour Fernandes, Tim Peneliti Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang menjelaskan alasan-alasan mengenai dinamakannya operasi senyap pelemahan KPK. Dan penutup dari berita berisi kutipan Hemi yang menolak segala bentuk yang dapat melemahkan KPK. Dan meminta Presiden Jokowi menghentikan pembahasan revisi UU KPK tersebut.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skip, penulis memberikan gambaran operasi senyap yang dilakukan oleh DPR dimulai unsur *what* yang berada pada paragraf pertama, yang menjelaskan DPR secara tiba-tiba mengusulkan revisi UU KPK di penghujung masa aktifnya. Dan pada unsur *why* dengan adanya kutipan dari akademisi yang menolak revisi UU KPK, penulis ingin memberikan penilaian kepada khalayak bahwa Hemi, Tim Peneliti Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, menolak segala bentuk pelemahan KPK. Dalam penulisan berita ini penulis hanya menggunakan satu narasumber yang memberikan pandangan bahwa upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh DPR. Dengan begini terkesan penulis tidak berimbang dalam penulisan berita ini.

3) Struktur Tematik

Dengan memperhatikan unsur tematik dalam artikel berita ini dapat dilihat jelas bahwa penulis menggambarkan penolakan Hemi Lavour Fernandes selaku akademisi terkait dengan revisi UU KPK yang dilakukan DPR. Penulis berupaya mengutip pernyataan Tim Peneliti Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan maksud menolak tegas segala upaya bentuk pelemahan KPK. Secara tematik penulis membawa pembaca kedalam satu tema saja, yaitu tentang operasi senyap yang dilakukan oleh DPR terhadap revisi UU KPK.

Paragraf pertama menjelaskan DPR secara mendadak mengusulkan revisi UU KPK di akhir masa tugas. Selanjutnya, dari paragraf kedua sampai terakhir berisi seluruh pernyataan dari narasumber dimana menolak tegas revisi UU KPK itu dilakukan.

4) Struktur Retoris

Dari foto dalam berita ini, menggambarkan ilustrasi kepedulian khalayak terhadap keadaan yang ada pada saat ini. Karena dalam gambar tersebut terdapat kata “Berani Peduli Hebat”. Kepedulian itu ditunjukkan oleh akademisi Tim Peneliti Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas yang menolak revisi UU KPK karena dinilai melanggar aturan dan dapat melemahkan KPK.

Selanjutnya penggunaan kata “operasi senyap” menjelaskan bahwa revisi UU KPK yang dinilai tidak taat pada aturan oleh DPR. Selain itu, DPR juga mendahulukan revisi UU KPK ketimbang membahas UU Prolegnas Prioritas terlebih dahulu.

4. Analisis Berita 4

Judul : Pengamat Soal Revisi UU KPK: Isinya Bukan
Menguatkan tapi Melemahkan

Sumber : Detik.com. Sabtu, 7 September 2019

Ringkasan :

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menagih janji kepada presiden yang mau memberantas korupsi dengan menolak revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR.

Tabel 7
Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	<i>Pengamat Soal Revisi UU KPK: Isinya Bukan Menguatkan tapi Melemahkan</i>
	<i>Lead</i>	Pusat Kajian Anrikorupsi (Pukat) UGM menagih janji Presiden JokoWidodo untuk memperkuat KPK. Dan berharap presiden menolak terkait pembahasan revisi UU KPK.
	Latar Informasi	Tanggapan atas pembahasan revisi UU KPK oleh DPR dan meminta presiden untuk mempertahankan janji semasa kampanyenya
	Kutipan Sumber	Peneliti Pukat UGM, Zainal Arifin Muchtar <ul style="list-style-type: none"> • Menagih janji Jokowi yang ingin menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. • Presiden setidak punya waktu lama untuk mempelajari usulan tersebut sehingga revisi UU KPK tidak akan berjalan. • Meminta Jokowi tidak menyetujui revisi UU KPK dan mempertahankan janjinya.

	Pernyataan/Opini	Tidak opini dalam berita ini. Seluruh isi berita ditulis berdasarkan pernyataan narasumber.
	Penutup	Pernyataan narasumber yang berharap presiden Jokowi mau menolak membahas dan menyetujui RUU tersebut.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Mengharap presiden menolak pembahasan revisi UU KPK
	<i>Where</i>	Tidak ada dalam berita ini.
	<i>When</i>	Sabtu, 7 September 2019
	<i>Who</i>	Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Muchtar
	<i>Why</i>	Karena gaya DPR dalam membahas revisi UU KPK terlalu buru-buru dan isinya bukan memperkuat tapi melemahkan
	<i>How</i>	Tidak ada dalam berita ini.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Keseluruhan isi berita adalah pernyataan Zainal Arifin Muchtar
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ndak</i> usah

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Judul dalam pemberitaan ini diambil dari pernyataan narasumber yaitu Zainal Arifin Muchtar yang menilai isi dari revisi UU KPK bukan memperkuat tapi melemahkan KPK. Hal ini sudah penulis menunjukkan bahwa isi dari berita ini mengenai pernyataan peneliti Pukat UGM yang berharap Presiden Joko Widodo menolak pembahasan revisi UU KPK dan meminta untuk mempertahankan janjinya yaitu memperkuat KPK. Hal ini juga sudah diperjelas lagi dalam *lead* dari berita ini.

Berikutnya latar informasi berita juga menggambarkan hal serupa. Dan kutipan sumber yang hanya menggunakan satu narasumber yang berasal dari kalangan akademisi. Dari semua pernyataan berisi narasumber yang benar-benar menaruh kepercayaan kepada presiden terkait janji-janjinya yang ingin memberantas korupsi dan memperkuat KPK, yaitu dengan membuat keputusan menolak untuk membahas revisi UU KPK. Pada berita ini ditutup dengan pernyataan narasumber yang berpesan kepada presiden untuk memikirkan baik-baik revisi UU KPK, mengingat isinya yang dapat melemahkan KPK dan banyak yang menentangnya dari berbagai masyarakat

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip, artikel berita ini tidak memuat unsur *where* dan *how*, hal ini membuat isi dari berita tersebut tidak lengkap. Dari struktur ini dapat dilihat bahwa yang dikisahkan dalam berita ini dalam unsur *what* berharap penolakan revisi UU KPK oleh Presiden Jokowi. Yang dinyatakan oleh Zainal Arifin Muchtar sebagai unsur *who*. Dan unsur *why* karena isi revisi UU KPK itu melemahkan KPK bukan menguatkan.

3) Struktur Tematik

Dari struktur tematik, penulis menuliskan fakta dengan memuat kutipan langsung narasumber yang menyatakan pengharapan atas Jokowi menolak membahas revisi UU KPK dan meminta untuk mempertahankan

janjinya untuk memperkuat lembaga antikorupsi itu. Narasumber menjelaskan apa yang harus dilakukan Jokowi dalam memutuskan mengenai revisi UU KPK, yaitu dengan janjinya yang dulu pada masa kampanye ingin memberantas korupsi.

4) Struktur Retoris

Penggunaan kata “nda usah” yang ditulis dalam berita ini menunjukkan narasumber ini berbicara dengan logat Jawa. Hal ini bisa ditujukan penulis kepada Jokowi yang sama halnya berasal dari Jawa.

5. Analisis Berita 5

Judul : Kasus Novel Baswedan-Revisi UU KPK Dinilai sebagai Upaya Pelemahan KPK

Sumber : Detik.com. Minggu, 8 September 2019

Ringkasan :

Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK menilai upaya pelemahan KPK bukan bagian yang terpisah, melainkan bagian dari sistematis upaya terhadap pemberantasan korupsi.

Tabel 8

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 5

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	<i>Kasus Novel Baswedan-Revisi UU KPK Dinilai sebagai Upaya Pelemahan KPK</i>
	<i>Lead</i>	Rasamala Aritonang, Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK menilai upaya pelemahan KPK dilakukan secara sistematis sebelum revisi UU KPK disepakati atas inisiatif DPR.
	Latar Informasi	Pelemahan KPK bagian dari

		sistematis terhadap upaya pemberantasan korupsi.
	Kutipan Sumber	<p>Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisi UU KPK bukan kondisi yang terpisah, tapi merupakan bagian dari sistematis upaya pemberantasan korupsi. • Ada 4 upaya sistematis yang dimaksud. • KPK menyoroti 9 poin mendasar terkait revisi UU KPK, diantaranya mengenai pembentukan dewan pengawas dan kewenangan terkait dengan perizinan atas operasi yang dilakukan KPK. Kemudian penyidik harus dari kepolisian.
	Pernyataan/Opini	Tidak opini dalam berita ini. Seluruh isi berita ditulis berdasarkan pernyataan narasumber
	Penutup	Pernyataan narasumber yang menjelaskan mengenai kegiatan penyidikan dan penuntutan ke depannya tidak akan berjalan dengan baik.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Revisi UU KPK merupakan salah satu dari serangkaian dari

		upaya melemahkan KPK.
	<i>Where</i>	Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan
	<i>When</i>	Minggu, 8 September 2019
	<i>Who</i>	Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang
	<i>Why</i>	Karena revisi UU KPK bukan hanya satu kondisi terpisah melainkan bagian dari sistematis upaya pelemahan pemberantasan korupsi.
	<i>How</i>	Terdapat 4 upaya sistematis upaya pemberantasan korupsi
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Seluruh paragraf berita ini adalah pernyataan dari narasumber yang menjelaskan upaya sistematis terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	• Menyoroti

Analisis:

1) Struktur Sintaksi

Pada berita ini, secara sintaksis penulis menyusun fakta berdasarkan skema berita diantaranya judul dan *lead*. Dalam pemberitaan ini penulis menggambarkan terdapat upaya yang sistematis dibalik revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Penulis menjelaskan bahwa terdapat empat upaya sistematis salah satunya belum terungkapnya

tersangka penyerangan terhadap Novel Baswedan penyidik KPK. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan judul dalam berita ini.

Pelemahan KPK bagian dari sistematis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Artinya terdapat upaya-upaya lain yang dapat melemahnya lembaga antikorupsi tersebut. Kutipan sumber yang digunakan hanya menggunakan satu narasumber yang merupakan pegawai dari KPK yang mengemukakan banyak pendapat yang tentunya kontra dengan revisi UU KPK. Penutup berita adalah kutipan dari narasumber mengenai kegiatan penyidikan dan penuntutan yang menjadi sulit akibat UU KPK yang baru. Ini dimaksud sebagai upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.

2) Struktur Skrip

Struktur skrip mengisahkan berita dari unsur yang ada, unsur *what* mengisahkan revisi UU KPK merupakan salah satu dari serangkaian dari upaya melemahkan KPK. Serta unsur penekan *why* dan *how* masing-masing revisi UU KPK bukan hanya satu kondisi terpisah melainkan bagian dari sistematis upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Dan dijelaskan oleh narasumber beberapa upaya lain yang merupakan bentuk pelemahan KPK.

3) Struktur Tematik

Berdasarkan analisis tematik tema yang diusung berita ini hanya satu tema, yaitu Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, yang menjelaskan berbagai upaya sistematis salah satunya revisi UU KPK yang merupakan bagian dari upaya tersebut disusul dengan ke empat upaya yang lain.

4) Struktur Retoris

Secara unsur retoris, terlihat upaya penulis untuk menekankan fakta dengan menggunakan kata “menyoroti” yang digunakan di dua paragraf terakhir. Penggunaan kata ini mengartikan kepada poin terkait revisi UU KPK yang disebut sebagai bentuk pelemahan KPK.

6. Analisis Berita 6

Judul : Revisi UU KPK Disebut Bikin Anggota DPR Kebal Hukum

Sumber : Detik.com. Selasa, 10 September 2019

Ringkasan :

Revisi UU KPK dianggap menjadi jalan aman bagi anggota Dewan, karena dianggapnya jalan terakhir agar kasus hukumnya lepas.

Tabel 9

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 6

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Revisi UU KPK Disebut Bikin Anggota DPR Kebal Hukum
	<i>Lead</i>	Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi menyebutkan revisi UU KPK akan membuat anggota DPR menjadi kebal hukum.
	Latar Informasi	Tanggapan atas revisi UU KPK dapat menjadi anggota DPR kebal terhadap hukum.
	Kutipan Sumber	Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi <ul style="list-style-type: none"> • Seakan-akan anggota DPR kebal hukum. Karena kebanyakan dari mereka banyak tersandung kasus korupsi. • Revisi UU KPK menjadi jalan

		<p>aman bagi anggota Dewan yang gagal terpilih. Karena dianggap jadi jalan terakhir agar kasus hukumnya lepas setelah masa jabatannya.</p> <p>Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Razak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihaknya akan menyampaikan keberatan yang juga dirasakan masyarakat Indonesia mengenai rencana revisi UU KPK.
	Pernyataan/Opini	Tidak opini dalam berita ini. Seluruh isi berita ditulis berdasarkan pernyataan narasumber.
	Penutup	Pernyataan narasumber yang mendesak DPR RI. Narasumber ingin bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Revisi UU KPK membuat para anggota DPR menjadi kebal hukum.
	<i>Where</i>	Bogor
	<i>When</i>	Selasa, 10 September 2019
	<i>Who</i>	Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Razak

	<i>Why</i>	Karena anggota Dewan kerap tersandung kasus korupsi.
	<i>How</i>	Revisi UU KPK menjadi jalan terakhir agar kasus hukumnya terlepas pada masa jabatannya rampung.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama menjelaskan pernyataan dari Yusfritriadi yang menuturkan revisi UU KPK dapat menjadikan anggota DPR kebal hukum. Disambung dengan paragraf berikutnya. dan paragraf terakhir, yaitu paragraf 5 dan 6 berisi pernyataan narasumber yang kedua yang menjelaskan ingin bertemu presiden karena dinilai masyarakat keberatan mengenai revisi UU KPK.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar berita ilustrasi penolakan revisi UU KPK • Kebal hukum • Tersandung

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada pemberitaan ini, penulis menyusun fakta dimulai pada judul dan *lead*. Dalam *lead* berita ini menjelaskan pernyataan narasumber mengenai rencana revisi UU KPK yang membuat para anggota DPR menjadi hukum. Dalam pernyataan narasumber itulah penulis dijadikan dalam judul berita tersebut. Susunan fakta berikutnya adalah latar informasi dalam berita ini adalah seperti pada *lead* yang merupakan

pernyataan narasumber bahwa anggota DPR kerap tersandung kasus korupsi. Karena itulah revisi UU KPK membuat DPR menjadi kebal hukum.

Kutipan sumber yang terdapat dua narasumber yang berbeda pernyataan. Narasumber yang pertama menjelaskan revisi UU KPK yang berdampak pada anggota DPR yang akan kebal hukum karena kasus yang sering terjadi pada DPR adalah kasus korupsi. Narasumber yang kedua menyatakan keberatannya jika revisi UU KPK itu disahkan oleh presiden. Karena itu pihaknya ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip memberikan gambaran bahwa narasumber pertama, Yusfitriadi kepada pembaca adalah jalan terakhir DPR supaya kasus hukumnya dapat terlepas setelah masa jabatannya berakhir, dengan melihat unsur *what* revisi UU KPK membuat para anggota DPR menjadi kebal hukum, unsur *who* Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Razak, dan *why* karena karena anggota Dewan kerap tersandung kasus korupsi. Jadi menjadikan revisi UU KPK menjadi jalan aman bagi anggota Dewan yang gagal terpilih agar kasus hukumnya hilang setelah akhir masa jabatan.

3) Struktur Tematik

Secara tematik, penulis memberitakan berita ini dalam dua tema yang berbeda. Tema yang pertama penulis menjelaskan revisi UU KPK yang dinilai dapat menjadikan anggota DPR kebal terhadap hukum yang disampaikan oleh narasumber pertama. Tema yang kedua dengan narasumber yang berbeda menyampaikan pihaknya mewakili masyarakat keberatan mengenai revisi UU KPK dan ia ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan tersebut.

4) Struktur Retoris

Dari foto berita tersebut, menggambarkan ilustrasi yang dimaksudkan penolakan masyarakat mengenai disahkannya revisi UU

KPK. Kata “kebal hukum” yang sering disebutkan dalam berita tersebut menjelaskan bahwa bila disahkannya revisi UU KPK menjadikan anggota Dewan tidak mempan terhadap hukum. Dan kata “tersandung” menggambarkan kiasan terhalang yang terdapat pada paragraf pertama yang artinya kebanyakan DPR terhalang oleh kasus korupsi.

7. Analisis Berita 7

Judul : Persetujuan Jokowi pada Revisi UU Bisa Jadi Awal

Lonceng Redupnya KPK

Sumber : Detik.com. Kamis, 12 September 2019

Ringkasan :

Presiden Jokowi yang telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR mengenai revisi KPK. Hal itu dinilai bahwa Jokowi telah menyetujui revisi UU KPK tersebut.

Tabel 10

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 7

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	<i>Persetujuan Jokowi pada Revisi UU Bisa Jadi Awal Lonceng Redupnya KPK</i>
	<i>Lead</i>	Presiden sudah mengirimkan Surpres mengenai revisi UU KPK pada DPR. Langkah tersebut dinilai bahwa Jokowi telah menyetujui hal yang akan dilakukan DPR
	Latar Informasi	Keputusan Jokowi mengirimkan Surpres revisi UU KPK
	Kutipan Sumber	Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus

		<ul style="list-style-type: none"> • Keteguhan Jokowi mulai goyah, dengan gampangya terbawa irama DPR • Keputusan Jokowi menandatangani Surpres ke DPR menjadi lonceng tanda KPK akan kian redup • Surpres akan jadi bola ketika revisi UU KPK sudah dibahas DPR. Perwakilan presiden tidak bisa begitu dominan menentukan sikap. Keputusan lebih banyak berasal dari fraksi DPR dan Pemerintah yang akan membuat keputusan itu. <p>Mensesneg, Pratikno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Presiden berisi persetujuan revisi UU KPK sudah diteken dan dikirim pemerintah. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU KPK yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf DPR.
	Pernyataan/Opini	Tidak opini dalam berita ini. Seluruh isi berita ditulis berdasarkan pernyataan narasumber.
	Penutup	Pernyataan narasumber Mensesneg, Pratikno yang

		menjelaskan bahwa DIM yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf yang dikirim DPR.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Presiden Jokowi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR tentang revisi UU KPK.
	<i>Where</i>	Tidak ada dalam berita ini.
	<i>When</i>	Kamis, 12 September 2019
	<i>Who</i>	Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dan Mensesneg, Pratikno
	<i>Why</i>	Karena Jokowi sudah nampak goyah dan terbawa irama DPR.
	<i>How</i>	Surpres sudah diteken dan dikirim ke DPR. DIM yang dikirim pemerintah, banyak merevisi draf DPR.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf-paragraf awal berita ini didahului oleh pernyataan Lucius bahwa menurutnya Surpres yang telah dikirim presiden ke DPR dinilai sebagai tanda Jokowi telah mengikuti revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Berita dilanjutkan dengan memasukkan pernyataan Pratikno bahwa Surpres sudah diteken dan dikirim ke DPR.

		Dan DIM revisi UU KPK yang dikirim oleh pemerintah, banyak merevisi draf revisi UU KPK yang dikirim DPR.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Irama • Nafsu pamungkas • Lonceng • Kian redup

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Dari struktur sintaksis, penulis menyusun fakta dengan skema berita dimana dalam judul berita ini diambil dari pernyataan narasumber Lucius. Dan *lead* dalam berita ini menggambarkan bahwa Presiden telah menyetujui mengenai pembahasan revisi UU KPK dengan mengirimkan Surpres ke DPR. Dari kutipan sumber terdapat dua narasumber, narasumber pertama Lucius menyatakan persetujuan Jokowi atas revisi UU KPK dinilai sebagai tanda bahwa presiden telah mengikuti pembahasan revisi UU KPK tersebut dan hal itu menjadi tanda awal melemahkan KPK. Narasumber kedua Pratikno menjelaskan sebelumnya memang Presiden Jokowi sudah mengirimkan Surpres dan DIM revisi UU KPK banyak merevisi draf yang telah dikirim DPR. Dalam pernyataannya membenarkan KPK adalah lembaga independen dalam pemberantasan korupsi, punya kelebihan dibandingkan lembaga lainnya.

Dari kedua narasumber tersebut masing-masing dari pernyataannya terbilang kontras narasumber pertama Surpres tersebut menjadi tanda melemahkan KPK. Disisi lain dari pernyataan narasumber kedua membenarkan draf revisi yang dikirim DPR banyak yang direvisi pemerintah dan menjelaskan bahwa KPK adalah lembaga independen. Terlihat bahwa penulis beridir diranah yang netral dan objektif dengan pemilihan dua narasumber tersebut.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip, penulis mengisahkan fakta dalam berita ini tanpa menyertakan unsur *where*, dalam berita ini tidak terdapat dimana tempat untuk mengisahkan berita. Dalam berita ini menggambarkan persetujuan Jokowi atas pembahasan revisi UU KPK dengan melayangkan Surpres kepada DPR. Dapat dilihat pada unsur *what* pada berita ini dengan kalimat Presiden Jokowi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR tentang revisi UU KPK. Unsur *who* menggunakan dua narasumber yang berbeda dengan pernyataannya namun berkesinambungan. Unsur *why* terdapat pada kutipan narasumber Lucius, bahwa Jokowi sudah mulai goyah dan mengikuti irama yang didengungkan oleh DPR.

3) Struktur Tematik

Secara tematik, berita ini disampaikan secara berkesinambungan menjelaskan Surpres yang dikirim Jokowi ke DPR. Paragraf pertama berisi pernyataan Lucius bahwa Surpres sudah dikirim ke DPR dan hal itu menilai sebagai tanda bahwa Jokowi telah menyetujui revisi UU KPK. Di paragraf kedua masih narasumber yang pertama menjelaskan setuju Jokowi akan revisi UU KPK menjadi titik awal melemahkan KPK. Dengan pernyataan ini jelas bahwa narasumber menunjukkan kekecewaannya kepada Jokowi.

Diparagraf terakhir dimana narasumber kedua Pratikno secara berkesinambungan dengan sebelumnya memberikan tanggapan Jokowi memang sudah menekan dan mengirim Surpres ke Jokowi. pemerintah memastikan DIM revisi UU KPK yang dikirim pemerintah banyak merevisi UU KPK pada draf DPR. Dan narasumber kedua membenarkan lembaga KPK adalah lembaga yang independen dan berbeda dengan lembaga lain. Jadi dalam hal ini, narasumber kedua membenarkan pernyataan yang dilancarkan oleh narasumber yang pertama.

4) Struktur Retoris

Struktur retoris dalam berita ini terdapat beberapa kata yang ditonjolkan oleh penulis, yaitu kata “irama” yang menjelaskan Jokowi

telah mengikuti irama DPR. Irama yang dimaksud adalah keputusan Presiden mengirimkan Surpres ke DPR, sebagai tanda bahwa Jokowi telah mengikuti revisi UU KPK yang diusulkan dan dibahas oleh DPR. Selanjutnya kata “nafsu pamungkas” pada pernyataan revisi UU KPK adalah nafsu pamungkas DPR sebelum akhir masa jabatan. Menjelaskan keinginan kuat terakhirnya untuk revisi UU KPK. Terakhir, kata “lonceng” dan “kian redup” terdapat dalam satu kalimat pernyataan yang dimaksudkan oleh penulis sebagai tanda semakin melemahnya lembaga KPK.

8. Analisis Berita 8

Judul : Revisi UU KPK Dikritik Keras, Ini yang Sudah Dibahas DPR-Pemerintah

Sumber : Detik.com. Sabtu, 14 September 2019

Ringkasan :

DPR beserta pemerintah telah membahas revisi UU KPK dan akan dilanjutkan pada agenda rapat selanjutnya.

Tabel 11

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 8

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	<i>Revisi UU KPK Dikritik Keras, Ini yang Sudah Dibahas DPR-Pemerintah</i>
	<i>Lead</i>	DPR bersama pemerintah sudah menggelar rapat tentang revisi UU KPK. Terdapat beberapa hal sudah dibahas dan melanjutkannya pekan depan.
	Latar Informasi	Perkembangan revisi UU KPK yang telah dibahas DPR dan pemerintah

	Kutipan Sumber	<p>Ketua Baleg DPR, Supratman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisi UU KPK belum selesai dan akan dilanjutkan pada Senin, 16 September. Karena Menkum HAM, Yasonna berada diluar kota. • Terdapat beberapa substansi usulan pemerintah yang harus disesuaikan dengan pendapat fraksi-fraksi. <p>Mahfud MD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semangat protes karena merasa tidak dipedulikan, disikapi secara sepihak.
	Pernyataan/Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan poin-poin revisi UU KPK yang disetujui dan ditolak. Ada 3 poin yang disetujui dan 4 poin yang ditolak Jokowi. • Poin yang disetujui adalah pembentukan Dewan Pengawas, pemberian kewenangan SP3, dan pegawai KPK harus berstatus ASN. • 4 poin yang ditolak Jokowi adalah permintaan izin penyadapan ke pengadilan serta penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan.

		<p>Kemudian KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan terkait penuntutan dan perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan KPK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisi UU KPK terkesan terburu-buru dan banyak mendapat kritik dari berbagai kalangan. Pimpinan KPK menyerahkan mandat kepada presiden karena merasa tak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK.
	Penutup	Pernyataan Mahfud MD bahwa semangat protes karena merasa tidak dipedulikan, disikapi secara sepihak, dan secara hukum tidak ada nilai penyerahan mandat dari KPK.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Rapat revisi UU KPK yang akan dilanjutkan pada pekan selanjutnya, Senin 16 September 2019
	<i>Where</i>	Gedung DPR, Senayan
	<i>When</i>	Jumat, 13 September 2019
	<i>Who</i>	Menkum HAM, Yasonna Laoly dan Mahfud MD.
	<i>Why</i>	Karena Menkum HAM, Yasonna Laoly tidak menghadiri dalam

		rapat revisi UU KPK.
	<i>How</i>	Rapat sudah membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan belum membahasa poin-poin revisi UU KPK yang krusial.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama berita memberitahukan bahwa DPR bersama pemerintah sudah menggelar rapat tentang revisi UU KPK. Berikutnya dilanjutkan pernyataan Supratman yang menjelaskan rapat revisi UU KPK belum selesai dan akan dilanjutkan lagi pekan depan. Tambahnya ada beberapa substansi usulan pemerintah yang harus disesuaikan dengan pendapat fraksi-fraksi. Paragraf terakhir ditutup dengan pernyataan Mahfud MD, ia mengetahui semangat protes karena merasa tidak dipedulikan dan hanya disikapi secara sepihak mengenai revisi UU KPK.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Foto ilustrasi rapat di Baleg DPR.

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis, terlihat penulis menyusun fakta dimulai pada judul berita ini dimana DPR dan pemerintah terus mengebut membahas revisi UU KPK. Namun diluar sana, banyak masyarakat yang terus menolak disahkannya revisi UU KPK karena dinilai melemahkan KPK. Pada *lead* berita disusun penulis memberitahukan kepada khalayak mengenai perkembangan revisi UU KPK sejauh ini. Terdapat dua narasumber dalam berita ini, narasumber Supratman menjelaskan perkembangan rapat pembahasan revisi UU KPK sementara Mahfud MD memberi pernyataan yang sesuai dalam judul berita dimana ia mengatakan bahwa banyak rakyat yang gelisah yang terdapat pada tubuh KPK dan melontarkan kritik keras. Pernyataan Mahfud MD tersebut juga sebagai penutup dalam pemberitaan ini.

2) Struktur Skrip

Dari struktur skrip, menonjolkan unsur *what* dimana rapat revisi UU KPK yang akan dilanjutkan pada pekan depan yang telah dijelaskan Supratman yang juga merupakan bagian dari unsur *who*. Unsur *why* melengkapinya mengapa rapat revisi UU KPK dilanjutkan pekan depan, karena pada rapat sebelumnya Menkum HAM, yaitu Yasonna Laoly tidak hadir dalam rapat tersebut karena sedang berada diluar kota.

3) Struktur Tematik

Dari struktur tematik, penulis membawa pada dua pemahaman, pemahaman pertama pada pembahasan revisi UU KPK yang dijelaskan oleh narasumber pertama yang dijelaskan pada awal dan ditengah berita. Sementara itu narasumber yang kedua menjelaskan banyak masyarakat yang mengkritik, menolak dan menentang revisi UU KPK. Walaupun banyak ditentang oleh banyak masyarakat, namun tidak membuat DPR bersama pemerintah menghentikan pembahasan revisi UU tersebut dan pembasahan akan terus berlanjut hingga disahkannya UU yang baru.

4) Struktur Retoris

Struktur retorik pada berita ini terdapat gambar ilustrasi rapat di Baleg DPR. Hal ini menunjukkan pada isi berita ini yang akan membahas mengenai perkembangan revisi UU KPK oleh DPR dan pemerintah

9. Analisis Berita 9

Judul : ICW: Revisi UU KPK Serampangan dan Buru-buru

Sumber : Detik.com. Minggu, 15 September 2019

Ringkasan :

Lembaga ICW yang terus menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK.

Tabel 12
Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 9

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	<i>ICW: Revisi UU KPK Serampangan dan Buru-buru</i>
	<i>Lead</i>	Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak revisi KPK karena dinilai terkesan buru-buru dan serampangan.
	Latar Informasi	Penolakan revisi UU KPK oleh ICW
	Kutipan Sumber	Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana <ul style="list-style-type: none"> • Sampai hari ini tidak mengetahui sebenarnya urgensi dari DPR cepat-cepat untuk mengesahkan RUU KPK. • Pembahasan RUU KPK seperti sebuah drama. Karena dalam

		<p>waktu yang cepat revisi UU KPK tersebut sudah disahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisi UU KPK sebelumnya tidak ada dalam daftar Prolegnas Prioritas. Revisi UU KPK ini bermasalah dalam sisi formalnya.
	Pernyataan/Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi UU KPK sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Poin-poin dalam revisi UU dikhawatirkan melumpuhkan KPK, mulai dari penyadapan harus seizin dewan pengawas hingga kewenangan penghentian kasus. • Revisi UU KPK terus mendapat penolakan dari berbagai pihak karena dinilai upaya untuk melemahkan KPK.
	Penutup	Pernyataan penulis bahwa revisi UU KPK banyak mendapat penolakan karena dinilai dapat melemahkan KPK.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Penolakan revisi UU KPK oleh lembaga ICW
	<i>Where</i>	Bangi Kopi, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan
	<i>When</i>	Minggu, 15 September 2019

	<i>Who</i>	Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana
	<i>Why</i>	Karena pembahasan revisi UU KPK terkesan serampangan dan terlalu buru-buru
	<i>How</i>	Revisi UU KPK sebelumnya tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas. Hal ini yang membuat revisi UU KPK ini bermasalah.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama berita ini menjelaskan penolakan revisi UU KPK yang dibahas terburu-buru dan serampangan. Selanjutnya berisi pernyataan-pernyataan narasumber mengenai hal terburu-burunya DPR dalam membahas revisi UU KPK dan dinilai bermasalah dari sisi formalnya. Paagraf terakhir berita ini berupa pernyataan penulis mengenai revisi UU KPK banyak penolakan dari berbagai pihak karena dinilai melemahkan KPK.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Serampangan

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Dari struktur sintaksis, penulis seperti memberikan kesan tidak setuju dengan pembahasan revisi UU KPK. Dari judul berita tersebut memberitahukan bahwa penulis menyusun fakta dengan revisi UU KPK yang dibahas oleh DPR dan pemerintah terlalu buru-buru dan bermasalah dari sisi formalnya. Serta dalam *lead* berita menyuarakan hal yang sama. Hal ini yang menjadikan bahwa penulis menolak revisi UU KPK yang terbilang buru-buru dan serampangan.

Kutipan sumber hanya menggunakan satu narasumber yang merupakan peneliti dari ICW yang banyak menyatakan penolakannya terhadap pembahasan revisi UU KPK. Bahkan dalam kutipan opini nampaknya penulis setuju dengan apa yang dijelaskan oleh narasumber bahwa revisi UU KPK sedang dibahas dengan poin-poin yang didalamnya dikhawatirkan melumpuhkan KPK.

2) Struktur Skrip

Dalam struktur skrip, penulis mengisahkan fakta dalam berita tersebut. Unsur *what* menjelaskan penolakan lembaga ICW terhadap revisi UU KPK, unsur *who* yang merupakan peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana, dan unsur *why* ini mengenai pernyataan narasumber yang menolak pembahasan revisi UU KPK karena dinilai terburu-buru dan serampangan. Dari sini terlihat penulis mengisahkan berita ini seperti apa yang dikemukakan narasumber yaitu penolakan revisi UU KPK karena dapat melumpuhkan KPK.

3) Struktur Tematik

Secara tematik, berita ini memuat kutipan langsung dari narasumber yang menggambarkan penolakannya terhadap revisi UU KPK. Kurnia Ramadhana menilai revisi UU KPK digarap secara terburu-buru bahkan ia beranggapan seperti sebuah drama. Karena dalam waktu yang sangat cepat revisi UU KPK sudah disahkan menjadi RUU dan diajukan ke presiden. Bahkan narasumber menyebutkan revisi UU KPK bermasalah dalam sisi formal karena revisi UU tersebut

sebelumnya tidak masuk dalam Prolegnas Nasional. Dan pada bagian terakhir berita penulis memberikan informasi revisi UU KPK banyak ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat karena dinilai melemahkan KPK.

4) Struktur Retoris

Struktur retorik berita ini, terdapat kata “serampangan” yang dikemukakan oleh narasumber. Hal ini dimaksudkan DPR dalam membahas revisi UU KPK tidak dipikirkan terlebih dulu secara matang dan sebaliknya revisi UU KPK dibahas secara buru-buru dan sembarangan atau sewenang-wenang. Selain itu juga narasumber menilai revisi UU KPK yang dibahas DPR bermasalah.

10. Analisis Berita 10

Judul : Kejanggalan-kejanggalan dalam Pembahasan Revisi UU KPK

Sumber : Detik.com. Selasa, 17 September 2019

Ringkasan :

Media detik.com membahas kejanggalan-kejanggalan mengenai pembahasan revisi UU KPK.

Tabel 13

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 10

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	<i>Kejanggalan-kejanggalan dalam Pembahasan Revisi UU KPK</i>
	<i>Lead</i>	Revisi UU KPK membuat publik terkesiap. Pembahasan revisi UU KPK bergulir dengan segenap kejanggalan.
	Latar Informasi	Ditemukannya beberapa hal yang janggal selama DPR membahas revisi UU KPK.

	Kutipan Sumber	<p>Ketua KPK, Agus Rahardjo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prihatin dan cemas karena pihak KPK tidak mengetahui pembasahasan dan isi draf revisi UU KPK. <p>Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPK perlu dilibatkan bahkan sejak awal. Karena KPK adalah pihak yang paling terkait dengan revisi UU tersebut. • Bagaimana mungkin DPR membahas suatu yang bukan ada di Prolegnas Prioritas. DPR mengabaikan prosedur, dan memaksakan menjalankan revisi UU KPK. <p>Ketua DPR, Bambang Soesatyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisi UU KPK seleasi tahun ini. Semua tergantung DPR dan pemerintah <p>Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat konspirasi diam-diam yang dijalankan pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK. Tak ada transparansi di proses revisi KPK. Kemudian,
--	----------------	---

		Presiden Jokowi mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR.
	Pernyataan/Opini	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi UU KPK digulirkan secara ngebut jelang akhir masa jabatan DPR. • Revisi UU KPK memang masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Tetapi, tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019. Aturannya, DPR harus memasukkan suatu perencanaan rancangan UU ke Prolegnas Prioritas terlebih dahulu sebelum membahasnya. • Revisi UU KPK disepakati oleh DPR yang hanya dihadiri 70 orang anggota dari 560 anggota. • Revisi UU KPK sudah berulang kali diusulkan, namun selalu mendapat penolakan, sebelum akhirnya disahkan pada 5 September 2019.
	Penutup	Pernyataan penulis revisi UU KPK akhirnya disetujui oleh Baleg DPR dan Menkum Ham dan pada akhirnya disahkan menjadi inisiatif DPR.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Revisi UU KPK membuat publik terkejut

	<i>Where</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan • Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan
	<i>When</i>	Senin, 16 September 2019
	<i>Who</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua KPK, Agus Rahardjo • Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari • Ketua DPR, Bambang Soesatyo • Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif
	<i>Why</i>	Karena revisi UU KPK dibahas dengan beberapa kejanggalan.
	<i>How</i>	Terdapat beberapa poin kejanggalan pembahasan revisi UU KPK.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Paragraf pertama berisi pengantar penulis mengenai kejanggalan dalam pembahasan revisi UU KPK. Selanjutnya penulis menunjukkan beberapa poin kejanggalannya, yaitu pimpinan KPK yang tak dilibatkan, ngebut revisi UU KPK jelang akhir masa jabatan, revisi UU KPK tidak masuk

		dalam Prolegnas Prioritas tapi diprioritaskan, rapat yang dihadiri 70 anggota DPR tetap diputuskannya revisi UU KPK, terakhir diusahakannya DPR meski ditolak publik berkali-kali.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar ilustrasi seseorang yang ingin mengetuk gedung KPK dengan palu • Ngebut

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Pada berita ini, penulis menyusun fakta berdasarkan diantara judul dan *lead* yang menunjukkan kejanggalan-kejanggalan pembahasan revisi UU KPK. Dari latar informasi ditemukan beberapa kejanggalan yang memperkuat dalam penyusunan fakta. Selain itu dari kutipan sumber penulis menggunakan empat narasumber sekaligus untuk memperjelas kejanggalan yang akan ditulis penulis. Diantara narasumber tersebut adalah Agus Rahardjo, Feri Amsari, Bambang Soesatyo, Laode M Syarif yang mana narasumber tersebut mempertegas poin per poin. Pernyataan penulis dalam berita ini menambahkan data dari pernyataan-pernyataan dari narasumber supaya berita ini benar-benar jelas.

2) Struktur Skrip

Sama dengan struktur sintaksis, dalam struktur skrip penulis mengisahkan fakta dengan menonjolkan pada pembahasan revisi UU KPK, dimana dalam unsur *what* dalam berita ini revisi UU KPK yang membuat masyarakat terkesiap, unsur *why* revisi UU KPK yang selama ini dibahas DPR dipenuhi dengan beberapa kejanggalan. Unsur *who* terdapat empat narasumber yang melengkapi berita tersebut. Penulis

dalam berita ini ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa revisi UU KPK yang dibahas DPR bersama pemerintah terdapat keganjilan.

3) Struktur Tematik

Struktur tematik dalam berita ini ditulis dengan beberapa opini penulis dan beberapa narasumber yang secara keseluruhan membahas hal-hal kecacatan yang dilakukan DPR dalam membahas revisi UU KPK. Penulis menjelaskan 5 poin kejanggalan dan setiap poin itu disisipkan dari pernyataan narasumber untuk memperkuat fakta berita ini.

4) Struktur Retoris

Berita ini dilengkapi dengan gambar ilustrasi seseorang yang ingin mengetuk gedung KPK dengan palu. Gambar ini dimaksudkan penulis bahwa terdapat seorang yang ingin melemahkan lembaga KPK dimulai dari disahkannya revisi UU KPK. Makna kata “ngebut” dalam poin kedua yaitu, DPR bersama pemerintah yang membahas revisi UU KPK dengan terburu-buru dimasa akhir jabatannya.

11. Analisis Berita 11

Judul : Dukung Revisi UU KPK, Jokowi Dinilai Ingkar Janji
Pemberantasan Korupsi

Sumber : Detik.com. Selasa, 17 September 2019

Ringkasan :

Presiden Jokowi mengingkari janjinya dengan turut serta melemahkan pemberantasan korupsi dengan mengesahkannya revisi UU KPK

Tabel 14

Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 11

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	<i>Dukung Revisi UU KPK, Jokowi Dinilai Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi</i>

	<i>Lead</i>	Presiden Joko Widodo tidak menepati janji kampanyenya saat Pilpres 2019. Hal itulah Jokowi ingkar janji terkait pemberantasan korupsi.
	Latar Informasi	Presiden Jokowi ikut andil mengesahkan revisi UU KPK
	Kutipan Sumber	<p>Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Janji presiden memberantas korupsi malah sebaliknya. • RUU KPK dilakukan presiden turut serta pelemahan pembertantasan korupsi. • Sudah banyak publik bersuara untuk tidak melanjutkan revisi UU KPK, tetapi presiden dan DPR tetap melakukannya. • Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
	Pernyataan/Opini	Tidak opini dalam berita ini. Seluruh isi berita ditulis berdasarkan pernyataan narasumber.
	Penutup	Pernyataan narasumber yang akan mengajukan judicial review ke MK.

Struktur Skrip	<i>What</i>	Presiden Jokowi mengingkari janji pemberantasan korupsi.
	<i>Where</i>	Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan
	<i>When</i>	Selasa, 17 September 2019
	<i>Who</i>	Karena presiden ikut andil dalam pengesahan revisi UU KPK.
	<i>Why</i>	Jokowi ikut andil dalam pengesahan revisi UU KPK bersama DPR.
	<i>How</i>	Sudah banyak masyarakat untuk tidak melanjutkan revisi UU KPK tapi presiden dan DPR tetap melanjutkannya.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Pada berita ini diawali dengan pernyataan narasumber bahwa Presiden Jokowi dinilai tidak menepati janji saat kampanye Pilpres 2019 soal pemberantasan korupsi. Dilanjutkan lagi Jokowi ikut andil dalam mengesahkan revisi UU KPK. Karena hal itu, Jokowi ikut dalam pelemahan pemberantasan korupsi. Berita ini ditutup dengan pernyataan narasumber juga bahwa akan mengajukan judicial review ke MK.
Struktur Retoris	Kata, idiom,	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar Presiden Jokowi

	gambar/foto, grafik	pada saat Debat Pilpres.
--	---------------------	--------------------------

Analisis:

1) Struktur Sintaksis

Dalam berita ini penulis menyusun fakta dari judul berita yang diambil dari pernyataan narasumber. Sementara *lead* berita berisi penjelasan narasumber yang menilai Jokowi telah mengingkari janji dengan mendukung revisi UU KPK. Dari sini berita ini menggambarkan kritik dari narasumber pada presiden yang telah mendukung revisi UU KPK dan telah mengingkari janjinya soal memberantas korupsi. Dalam berita ini secara keseluruhan merupakan kutipan narasumber bahwa Presiden turut serta melemahkan KPK karena telah mengesahkan revisi UU KPK bersama dengan DPR. Narasumber juga mengkritik Jokowi yang tidak mau mendengar aspirasi dari masyarakat untuk tidak melanjutkan revisi UU KPK. Padahal, Presiden Jokowi dikenal sangat dekat dengan masyarakat.

2) Struktur Skrip

Dari struktur skrip, sejalan dengan struktur sintaksis, karena juga disusun dengan tujuan untuk memposisikan Jokowi sebagai pihak yang telah melakukan pelemahan terhadap KPK. Unsur-unsur 5W + 1H semua jelas sejalan dengan struktur sintaksis.

3) Struktur Tematik

Secara tematik, penulis menuliskan fakta dengan rapi untuk menggiring pembaca untuk ikut menyudutkan Jokowi dengan fakta yang dikemukakan di dalam berita ini. Dimana dari paragraf per paragraf berita ini berisi pernyataan resmi dari narasumber yang mengkritik Jokowi yang dinilai telah mengingkari janjinya karena ikut andil dalam upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan mengesahkan revisi UU KPK. Berita ini ditutup penjelasan narasumber yang akan mengajukan judicial review atau hak uji materi RUU KPK ke MK yang sesuai dengan jalur hukum.

4) Struktur Retoris

Secara retorik terlihat upaya penulis untuk membawa pembaca mengingat kembali pada saat Debat Pilpres seperti pada gambar dalam berita ini dimana calon presiden mengemukakan pernyataan-pernyataannya. Dalam gambar tersebut terpampang pak Presiden Jokowi yang sedang menjelaskan sesuatu. Hal ini dimaksudkan penulis bahwa Presiden Jokowi menjelaskan janji-janjinya termasuk janji memberantas korupsi.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Media detik.com merupakan sebagai media *online* publik dipengaruhi oleh konstelasi politik dengan ideologi yang berkembang di sekitarnya termasuk kekuasaan yang berlangsung. Revisi UU KPK adalah isu yang sensitif dan menjadi komoditas politik dari kekuatan-kekuatan yang ada. Pemerintah menjadi salah satu bagian dari kekuatan politik tersebut, yang bertarung dalam isu revisi UU KPK. Dalam pemberitaan revisi UU KPK, pemerintah menempati posisi tertentu yang dibaca oleh media detik.com dengan cara mem-framing bahwa revisi UU KPK adalah bagian dari pelemahan KPK.

Dari penelitian analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Media detik.com banyak membingkai berita revisi UU KPK sebagai upaya bentuk melemahkan dari lembaga KPK itu sendiri. Hal itu dibuktikan dari struktur sintaksis setiap pemberitaan yang muncul media selalu mengatakan revisi UU KPK adalah bagian dari pelemahan KPK yang dijadikan sebagai *headline* berita..
2. Dari hasil analisis pembedaan dapat disimpulkan bahwa detik.com membangun citra yang buruk terhadap revisi UU KPK yang diusulkan DPR, media detik.com menganggap revisi UU KPK adalah suatu tindakan pelanggaran. Hal tersebut ditonjolkan dari setiap pemberitaan yang muncul dalam penekanan kutipan yang menyatakan revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah adalah sebagai upaya sistematis, serampangan dan banyak hal ganjil selama pembahasan revisi UU KPK oleh DPR.
3. Dalam memilih fakta media detik.com sangat dipengaruhi ideologi yang dominan yang berpengaruh di redaksi detik.com, ideologi sebagaimana yang dibahas di bab 4 yang berkembang di media detik.com menganut Sistem Komunikasi Pancasila yang berbasis ideologi Pancasila sebagai

ideologi Indonesia. Pemilik media juga selalu menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam setiap pemberitaannya.

4. Dari analisis pembedaan terlihat bahwa media detik.com menunjukkan netralitas dan objektivitas media. Media detik.com sendiri tidak memiliki afiliasi politik dengan partai politik atau tokoh politik, framing yang dilakukan oleh media detik.com masih menunjukkan usaha media untuk melakukan pendekatan pada objektivitas dalam pemberitaan.

B. SARAN

Bagi pembaca, hendaknya dapat memahami makna yang terdapat di media massa, dengan mencermati kata, kalimat istilah, isi berita serta validitas sumber informasi yang tersaji di media massa. Serta aktif mencari informasi yang sama dari sumber media massa yang berbeda, untuk mengetahui kualitas kebenaran sebuah informasi, serta tidak menerima informasi secara apriori.

Di sisi lain pembaca berita sudah seharusnya dilandasi dengan pengetahuan yang cukup untuk memberikan praduga terhadap isi berita. Hal tersebut akan memberikan kekayaan pengetahuan pembaca berita dalam melihat persoalan-persoalan secara kompleks.

C. PENUTUP

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun masih jauh dari kata sempurna baik dari sisi penulisan, isi penulisan, dalam hal penyajian, atau pun dari sisi yang lain. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan dan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik tenaga maupun ide pikiran dan atas kebaikannya semoga mendapat imbalan dan ridha Allah SWT. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. 2000. *Media dan Minimnya Semangat Kesetaraan Gender*. Jakarta: Pantau.
- Alfani, Hendra. 2014. Perspektif Kritis Ekonomi Politik Media Konglomerasi, Regulasi dan Ideologi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2*. Jakarta: Universitas Budi Luhur.
- Anggoro, A. Sapto. 2012. *Detikcom Legenda Media Online*. Yogyakarta: MocoMedia.
- Ardianto, Elvinaro. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- Arif, Syaiful. 2011. *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*. Malang: Averreos Press & Pustaka Pelajar.
- Arifin, Anwar. 2011. *Dakwah Kontemporer (Sebuah Studi Komunikasi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arini, Ayu Laxmita. 2018. Pembingkai Berita “Kartu Kuning Jokowi”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Arnus, Sri Hadijah. 2014. Industrialisasi Media Massa dan Etika Jurnalistik. *Jurnal Al-Munzir, Vol. 7, No. 2*. Kendari: IAIN Kendari.
- Asep Syamsul, M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO dan Tips Media Sosial)*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Biagi, Shirley. 2010. *Media/Impact: Pengantar Media Massa*. Jakarta: salemba Humanika.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGarindo Persada.
- Citra Hayati Nainggolan. 2017. Analisis Framing Pemberitaan Ganjar Pranowo Dalam Kasus Korupsi E-KTP (Tribun News, Jawa Pos, dan Suara Merdeka Periode Agustus – November 2015 dan Maret 2017). *Skripsi*. Semarang: Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro.
- Djuroto, Totok. 2004. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Eisy, M. Ridlo. 2007. *Peranan Media Dalam Masyarakat, Kemerdekaan Pers Fondasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Endra, W. Surya. 1979. *Kamus Politik Serta Penjelasannya*. Surabaya: Study Group.

- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Fahmi. 2016. Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka dan CNN Indonesia dalam Isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebar Paham Radikalisme oleh BNPT. *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fiske, John. 1990. *Cultural and Communication: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Fitria, Sekarini Ashri. 2019. Analisis Framing Pemberitaan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Presiden 2019 di Liputan6.com dan Tempo.co. *Skripsi*. Surabaya: Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hajad, Vellayati. 2016. Media dan Politik (Mencari Independensi Media dalam Pemberitaan Politik). *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2*. Meulaboh: Universitas Teuku Umar.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Hidayat, Imam. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press.
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Chairul Tanjung](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Chairul_Tanjung) diakses pada 7 Juni 2020 Pukul. 20.01 WIB.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/DetikCom> diakses pada 1 Juni 2020 Pukul. 15:48 WIB.
- <https://m.detik.com/news/berita/d-4693690/besok-dpr-gelar-paripurna-bahas-revisi-uu-kpk> diakses pada 15 Juli 2020 Pukul. 07:58 WIB.
- <https://m.detik.com/news/berita/d-4695096/kpk-ungkap-9-poin-draf-revisi-uu-yang-berisiko-lumpuhkan-kpk> diakses pada 15 Juli 2020 Pukul. 07:59 WIB.
- <https://m.detik.com/news/berita/d-4695566/revisi-uu-kpk-dinilai-operasi-senyap-pelemahan-komisi-anti-rasuah> diakses pada 15 Juli 2020 Pukul. 07:59 WIB.
- <https://m.detik.com/news/berita/d-4696951/pengamat-soal-revisi-uu-kpk-isinya-bukan-menguatkan-tapi-melemahkan> diakses pada 15 Juli 2020 Pukul. 07:59 WIB.
- <https://m.detik.com/news/berita/d-4697859/kasus-novel-baswedan-revisi-uu-dinilai-sebagai-upaya-pelemahan-kpk> diakses pada 15 Juli 2020 Pukul. 07:59 WIB.
- <https://m.detik.com/news/berita/d-4701156/revisi-uu-kpk-disebut-bikin-anggota-dpr-kebal-hukum> diakses pada 15 Juli 2020 Pukul. 07:59 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4703050/persetujuan-jokowi-pada-revisi-uu-bisa-jadi-awal-lonceng-redupnya-kpk> diakses pada 15 Juli 2020 Pukul. 07:59 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4706621/revisi-uu-kpk-dikritik-keras-ini-yang-sudah-dibahas-dpr-pemerintah> diakses pada 15 Juli 2020 Pukul. 08:00 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4707366/icw-revisi-uu-kpk-serampangan-dan-buru-buru> diakses pada 15 Juli 2020 Pukul. 08:00 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4709223/kegagalan-kegagalan-dalam-pembahasan-revisi-uu-kpk> diakses pada 15 Juli 2020 Pukul. 08:00 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4710490/dukung-revisi-uu-kpk-jokowi-dinilai-ingkar-janji-pemberantasan-korupsi> diakses pada 15 Juli 2020 Pukul. 08:00 WIB.

<http://m.detik.com/news/berita/d-4709596/superkilat-ini-kronologi-13-hari-dpr-jokowi-revisi-uu-kpk> diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 18:51 WIB.

<https://m.detik.com/redaksi> diakses pada 2 Juni 2020 Pukul 10:30 WIB.

<http://politik.rmol.id/read/2018/06/18/344424/Ternyata,-Chairul-Tanjung-Juga-Diincar-Demokrat-> diakses pada 29 Juni 2020 Pukul 17.44 WIB.

Ishak, Aswad. 2011. *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Aspikom.

Kencana, Woro Harkandi. 2014. Konvergensi Media (Analisis Instiusional Komunikasi Bisnis Pada Transmedia Group). *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi (GELANGGANG) Vol. 1 No. 1*. Jakarta: Universitas Persada Indonesia Y.A.I.

Maghribi, Fairuz Ilham. 2019. Analisis Framing Pemberitaan (Isu Penyerangan Ulama di Indonesia dalam Harian Kompas.com dan Republika.co.id Periode Februari-April 2018). *Skripsi*. (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia).

Magnis-Suseno, Franz. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.

Mahdi, Acan. 2015. Berita Sebagai Representasi Ideologi Media (Sebuah Telaah Kritis). *Jurnal Al-Hikmah Vol. 9, No. 2*. Pontianak: Jurnal Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Mahpuddin. 2009. Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil Society. *Jurnal Academica Vol. 1, No. 2*. Palu: Jurnal Academica Universitas Tadulako.

Manan, Bagir. 2012. *Politik Publik Pers*. Jakarta: Dewan Pers.

- Masduki. 2004. *Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media dalam Pemilu 2004. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8, No. 1.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- McQuail, Denis. 2005. *Teori Komunikasi Massa.* Jakarta: Erlangga.
- Moloeng, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muttaqin, Ahmad. 2011. *Ideologi Dan Keberpihakan Media Massa. Jurnal Dakwah dan Komunika Vol. 5, No. 2, 2011.* Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Nasution, Amir Taat. 1987. *Kamus Politik.* Surabaya: Bina Ilmu.
- Nova, Firsan. 2009. *Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perubahan.* Jakarta: Grasindo.
- Pawito. 2015. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan.* Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra.
- Rahmatia, Widya. 2018. *Hierarki Pengaruh Media dalam Program Layar Pemilu Terpercaya di CNN Indonesia. Skripsi.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syafriadi. 2018. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia.* Yogyakarta: Suluh Media.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedomam Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.* Purwokerto: STAIN Press.
- Wahid, Umaimah. 2018. *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan aplikasi pada Era Media Baru.* Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Waluyo, Djoko. 2018. *Kebebasan Pers Pada Era Reformasi. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, Vol. 14, No. 1.* Jakarta: BPSDMP Kominfo.
- Zainal Abidin, Yusuf. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi, Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi.* Bandung: CV Pustaka Setia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



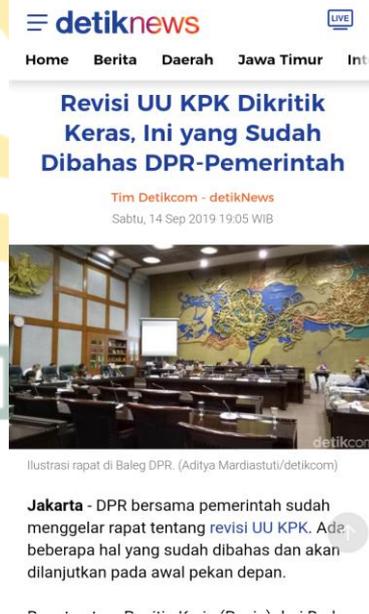
Gambar 7



Gambar 8



Gambar 9



Gambar 10



Gambar 11



Gambar 12



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Shandika Al Kafi
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 6 November 1998
Alamat Rumah : Negaradaha RT. 04/RW. 02, Bumiayu,
Brebes
No. Telpn : 082322991979
Email : muh.shandika.ak@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN Negaradaha 1 (2010)
- b. SMPN 3 Bumiayu (2013)
- c. MAN 2 Brebes (2016)
- d. IAIN Purwokerto (Aktif)

2. Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto (2016-2018)

C. Pengalaman Organisasi

Komunitas Fotografi FIXLENS IAIN Purwokerto

Bumiayu, 16 Juli 2020

Ttd.

IAIN PURWOKERTO

M. Shandika Al Kafi